

**POLA ORGANISASI KEMITRAAN DALAM
PENGEMBANGAN KOMODITAS BAGI PETANI MISKIN
DI KABUPATEN PANGKEP**

HAERUN NAHARI LATIF

Nomor Stanbuk : 10561 04976 14



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

**POLA ORGANISASI KEMITRAAN DALAM PENGEMBANGAN
KOMODITAS BAGI PETANI MISKIN DI KABUPATEN PANGKEP**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

HAERUN NAHARI LATIF

Nomor Stambuk : 10561 04976 14

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

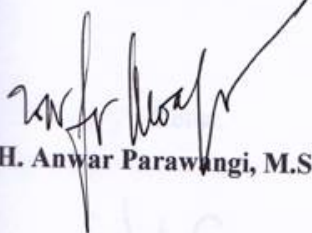
2018

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pola Organisasi Kemitraan Dalam Pengembangan
Komoditas Petani Miskin Di Kabupaten Pangkep
Nama Mahasiswa : Haerun Nahari Latif
Nomor Stambuk : 10561 04976 14
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I


Dr. H. Anwar Parawangi, M.Si

Pembimbing II



Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos. M.Si

Mengetahui:

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos. M.Si
NBM. 0915057101

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara

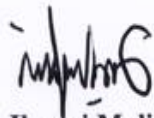

Nasrul Haq, S.Sos. MPA
NBM. 1067 463

PERNYATAAN PENERIMAAN TIM KARYA

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 1327/FSP/A.1-VIII/VIII/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Di Makassar pada hari Senin 20 Agustus 2018.

TIM PENILAI

Ketua,



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos. M.Si

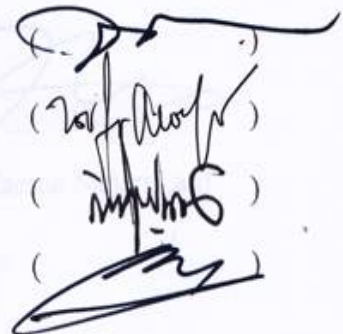
Sekretaris,



Dr. Burhanuddin, S.Sos. M.Si

Penguji:

1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si (Ketua)
2. Dr. H. Anwar Parawangi, M.Si
3. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos. M.Si
4. Dr. Burhanuddin, S.Sos. M.Si

Makassar 20 Agustus 2018
Yang Menandatangani,


PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa : Haerun Nahari Latif

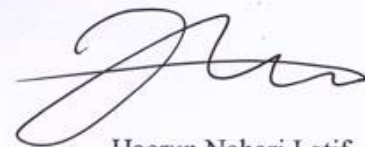
Nomor Stambuk : 10561 04976 14

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar saya, karya ini adalah penelitian ini saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis / dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar 23 Agustus 2018

Yang Menyatakan,



Haerun Nahari Latif

ABSTRAK

HAERUN NAHARI LATIF. Pola Organisasi Kemitraan dalam Pengembangan Komoditas Petani Miskin di Kabupaten Pangkep (dibimbing oleh Anwar Parawangi dan Samsir Rahim).

Pola organisasi kemitraan dalam pengembangan komoditas petani miskin di Kabupaten Pangkep dimana permasalahan yang muncul tidak sesuai dengan kondisi dilapangan yang dijalankan oleh pihak pemerintah dan pihak yang menjadi pengurus komoditas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola organisasi kemitraan dalam pengembangan komoditas bagi petani miskin di Kabupaten Pangkep, sehingga keberhasilan dalam pengembangan komoditas petani miskin dapat tercapai di Kabupaten Pangkep.

Tipe penelitian ini bersifat fenomenologi. Dasar penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu penulis bermaksud untuk mendeskripsikan pola organisasi kemitraan dalam pengembangan komoditas petani miskin di Kabupaten Pangkep, dimana penulis mewawancarai 7 informan, sumber data terdiri dari data primer dan data skunder. Data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara, sedangkan data skunder data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan peneliti.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap studi tentang Pola Organisasi Kemitraan dalam Pengembangan Komoditas Petani Miskin di Kabupaten Pangkep belum tercapai secara maksimal. Dilihat dari segi alih fungsi lahan, rendahnya sumber daya manusi petani, hasil produksi tidak sesuai dengan yang diharapkan petani, dan modal dari petani kurang. Sehingga pengembangan komoditas petani miskin belum terlaksana dengan baik.

KATA KUNCI : *Pola Organisasi, Kemitraan, Komoditas Petani*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pola Organisasi Kemitraan Dalam Pengembangan Komoditas Petani Miskin di Kabupaten Pangkep”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Anwar Parawangi, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos. M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani malik, S.Sos. M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos. M.si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dr. Hj. Sriwaty M.Hum selaku kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

5. Bapak Dewa Bochari selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
6. Bapak Drs. Ahmad Pramuda M.Hum selaku Fungsional Penyuluh Pertanian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
7. Kedua orang tua dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun materil.
8. Saudara Kardianto S.Sos selaku teman yang selalu memberikan semangat dan bantuan baik moril maupun materil.
9. Saudara Iswadi Amiruddin S.Sos selaku teman yang selalu memberikan semangat dan bantuan baik moril maupun materil.
10. Teman-teman kelas D 014 jurusan Administrasi Negara yang selalu menemani dari awal perkuliahan hingga sampai saat ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 23 Agustus 2018

Haerun Nahari Latif

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi.....	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Penerimaan Tim.....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah.....	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Implementasi Kebijakan Publik.....	8
B. Konsep Kemitraan	10
C. Organisasi Kemitraan.....	12
D. Pola Organisasi Kemitraan.....	16
E. Pengembangan Komoditas	17
F. Otonomi Daerah dan Desentralisasi	23
G. Komoditas Petani Miskin Pangkep.....	25
H. Peningkatan Kesejahteraan Petani.....	26
I. Kerangka Pikir	29
J. Fokus Penelitian	30
K. Deskripsi Fokus Penelitian.....	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	32
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	32
C. Sumber Data	33
D. Informan Penelitian.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisa Data	36
G. Pengabsahan Data	37

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kab. Pangkep	39
B. Deskripsi Dinas Pertanian Kab. Pangkep	55
C. Hasil dan Pembahasan	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA	69
----------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Panen, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Pangan 2014-2016...	17
Tabel II.2	Tanaman Perkebunan, Luas Lahan, Produksi, Produktivitas 2016..	18
Tabel II.3	Sumber Daya Laut Perikanan Kab. Pangkep	20
Tabel III.1	Daftar Informan.....	32
Tabel IV.1	Nama Bupati dan Wakil Pangkep dari Masa ke Masa	43
Tabel IV.2	Jumlah Penduduk 2016.....	46
Tabel IV.3	Luas Produksi Produktivitas	47
Tabel IV.4	Tanaman Perkebunan Luas Lahan	48
Tabel IV.5	Jumlah Ternak Unggas dan Ternak Besar	49
Tabel IV.6	Penggunaan Lahan	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Pola Organisasi Kemitraan Model Rantai.....	16
Gambar II.2	Pola Organisasi Kemitraan Model Roda.....	17
Gambar II.3	Bagan Kerangka Pikir “Pola Organisasi Kemitraan memakai Model Rantai”.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemitraan akhir-akhir ini sudah menjadi perhatian semua pihak. Kemitraan merupakan salah satu aspek dalam pertumbuhan iklim usaha melalui “pemberdayaan” dalam rangka memperoleh peningkatan pendapatan dan kemampuan usaha serta peningkatan daya saing dari usaha kecil dan menengah atau usaha besar. Pemberdayaan tersebut disertai perbaikan dan pengembangan oleh usaha menjadi atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Dengan demikian kemitraan merupakan suatu tindakan dan hubungan bisnis untuk membesarkan usaha kecil secara rasional.

Kemitraan dan kerjasama adalah norma yang dijalankan dalam satu perkumpulan sejak pendirian dan pembentukannya hingga proses fasilitasi implementasi pelaksanaan program, proyek, inisiatif dan kegiatan. Selain kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat, kemitraan dengan lembaga donor dan lembaga pembangunan nasional dan internasional juga memegang peranan yang sangat penting.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pangkep Nomor 4 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang menimbang, (a) bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar sebagai warga negara, perlu diselenggarakan upaya

perlindungan dan pemberdayaan masyarakat secara terencana, terarah dan berkelanjutan oleh penyelenggara pemerintahan; (b) bahwa adanya kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, gejolak ekonomi global, kerawanan terhadap bencana alam dan risiko gagal usaha, serta adanya sistem pasar yang tidak transparan dan tidak berpihak kepada petani, maka diperlukan perlindungan dan pemberdayaan petani.

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2017 tentang Kemitraan, yang menimbang “Bahwa untuk lebih mempercepat perwujudan perekonomian nasional yang mandiri dan andal sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, diperlukan upaya-upaya yang lebih nyata untuk menciptakan iklim yang mampu merangsang terselenggaranya kemitraan usaha yang kokoh diantara semua pelaku kehidupan ekonomi berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”. Dalam peraturan ini seharusnya yang dilakukan oleh kemitraan mensejahterakan masyarakat miskin melalui upaya-upaya yang lebih nyata. Tetapi kenyataan yang terjadi di masyarakat, masih banyak petani yang miskin karena belum mendapat sosialisasi dari pemerintah tentang situasi di pasaran, harga produksi pertanian rendah dan kurangnya modal petani untuk mengembangkan hasil produksinya.

Tujuan kemitraan adalah untuk mengangkat usaha kecil menjadi pilar pembangunan ekonomi karena kelemahan mendasar usaha kecil adalah dari segi ekonomi dan akses ke sumber permodalan dan pasar. Kelompok petani miskin dalam pengembangan komoditasnya memerlukan dorongan pemerintah dalam

peningkatan kualitas sumberdaya manusia, teknologi, permodalan dan pemasaran.

Terdapat 3 prinsip yang perlu dipahami dalam membangun suatu kemitraan yaitu: (1) Prinsip Kesetaraan (*Equity*) Individu, organisasi atau institusi yang menjalin kemitraan, harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati. (2) Prinsip Keterbukaan, Mewujudkan kerjasama kemitraan diperlukan upaya-upaya nyata dalam menciptakan iklim yang mampu merangsang terselenggaranya usaha yang kokoh berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Keterbukaan ini ada sejak awal dijalinnya kemitraan sampai berakhirnya kegiatan. (3) Prinsip Asas manfaat bersama (*mutual benefit*) Individu, organisasi atau institusi yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing-masing. Kegiatan atau pekerjaan akan menjadi efisien dan efektif bila dilakukan bersama.

Upaya kemitraan dalam keterkaitan usaha pengembangan komoditas dilaksanakan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan, dengan memberikan peluang kemitraan seluas-luasnya kepada petani miskin baik oleh pemerintah maupun dunia usaha.

Pada sisi lain kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan

pekerjaan. Menurut Ritonga (2003) memberikan definisi bahwa kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya. Kebutuhan dasar minimal yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan kebutuhan sosial yang diperlukan oleh penduduk atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kabupaten Pangkep, tahun 2016 jumlah penduduk miskin tercatat 32,53 juta jiwa, sebagian besar dari jumlah tersebut adalah masyarakat yang berada di pedesaan yaitu petani.

Salah satu daerah di Sulawesi Selatan yakni kabupaten Pangkep adalah kabupaten dengan sektor pertanian, namun hingga 2018 masih menjadi kabupaten termiskin kedua di Sulsel. Berdasarkan data sensus penduduk miskin yang dilansir BPS Pangkep, penduduk miskin di kabupaten ini meningkat dari 23.000 jiwa di tahun 2016 menjadi 26.000 jiwa di tahun 2017. Akan tetapi jika melihat potensi besar daerah ini utamanya pada sektor pertanian, seharusnya bisa dimaksimalkan sehingga dapat berkontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan.

Upaya mewujudkan pengembangan komoditas pertanian tidak terlepas dari berbagai macam masalah yang dihadapi, yaitu pertama; penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya lahan pertanian. Dari segi kualitas, lahan pertanian sudah mengalami degradasi yang luar biasa, dari sisi kesuburannya akibat dari pemakaian pupuk an-organik.

Kedua; adalah terbatasnya aspek ketersediaan infrastruktur penunjang pertanian yang juga penting, terutama pembangunan dan pengembangan waduk irigasi. Ketiga; adalah adanya kelemahan dalam sistem alih teknologi. Ciri utama pertanian modern adalah produktivitas, efisiensi, mutu dan kontinuitas pasokan yang terus menerus harus selalu meningkat dan terpelihara. Produk-produk pertanian baik komoditi tanaman pangan (hortikultura), perikanan, perkebunan dan peternakan harus menghadapi pasar dunia yang telah dikemas dengan kualitas tinggi dan memiliki standar tertentu. Tentu saja produk dengan mutu tinggi tersebut dihasilkan melalui suatu proses yang menggunakan muatan teknologi standar.

Keempat, muncul dari terbatasnya akses layanan usaha terutama di permodalan. Terakhir masalah kelima; adalah masih panjangnya mata rantai tataniaga pertanian, sehingga menyebabkan petani tidak dapat menikmati harga yang lebih baik, karena pedagang telah mengambil untung terlalu besar dari hasil penjualan.

Pengembangan komoditas pertanian diartikan sebagai rangkaian berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan petani, mengentaskan kemiskinan, memantapkan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, terdapat beberapa penelitian yang dapat dijadikan landasan dalam melakukan penelitian ini yaitu berdasarkan penelitian tentang Pemberdayaan Masyarakat Petani Miskin Marjinal di Kabupaten Bima, menjelaskan bahwa faktor penghambat tidak

menumbuhkembangkan kesadaran kritis masyarakat petani miskin marjinal akan pentingnya kemandirian dalam peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi melalui agrofrofesi. Sedangkan faktor pendukung membentuk dan meperkuat organisasi kelompok tani yang peduli terhadap pengelolaan lahan yang berkelanjutan (Pramuji, 2013).

Penelitian lainnya yaitu Strategi Pemberdayaan Masyarakat Petani Melalui Pengembangan Agribisnis (Studi Kasus Gapokan Subur Desa Kedungjati, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Prubalingga) bahwa hasil penelitiannya menunjukkan Pembinaan teknologi dan penguatan kelembagaan, mengembangkan pertanian organik menggunakan teknologi pertanian sehat tepat guna, kemudian pengelolaan irigasi, pengadaan modal dan pengelolaan usaha tani. Pengembangan petani miskin sudah cukup berjalan baik selama ini namun masih terdapat permasalahan dan belum sempurna (Wijayanti, 2017).

Banyak sekali petani miskin yang belum mengalami perkembangan komoditas di wilayah Indonesia terutama di Kabupaten Pangkep. Sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pola Organisasi Kemitraan dalam Pengembangan Komoditas bagi Petani Miskin di Kabupaten Pangkep”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana Pola Organisasi Kemitraan dalam Pengembangan Komoditas bagi Petani Miskin di Kabupaten Pangkep?

C. Tujuan penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka peneliti menuliskan tujuan penelitian sebagai berikut :

Untuk mengetahui pola organisasi kemitraan dalam pengembangan komoditas bagi petani miskin di kabupaten Pangkep.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat dikemukakan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang kondisi kemiskinan yang terjadi pada masyarakat petani dan pengembangan komoditasnya.
- b. Dapat dijadikan sebagai salah satu bahan untuk mempertimbangkan pendekatan yang tepat dalam usaha penanggulangan kemiskinan petani, sehingga program-program atau proyek-proyek yang ditawarkan bagi nelayan benar-benar efektif untuk meningkatkan kesejahteraan petani khususnya bagi Pemerintah Daerah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam usaha memperbaiki kesejahteraan hidup para petani.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik, sering bertentangan dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sendiri. Itulah sebabnya implementasi kebijakan publik, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang studi kebijakan publik, yang menurut Djajah Saefullah dalam prakatanya pada buku Tachjan (2006) bahwa studi kebijakan publik tersebut dapat dipahami dari dua perspektif yakni; Pertama, perspektif politik, bahwa kebijakan publik dalam perumusan, implementasi, maupun evaluasinya pada hakekatnya merupakan pertarungan berbagai kepentingan publik dalam mengalokasikan dan mengelolah sumber daya (*resources*) sesuai dengan visi, harapan dan prioritas yang ingin diwujudkan. Kedua, perspektif administrasi Merupakan ikhwal berkaitan dengan sistem, prosedur, dan mekanisme, serta kemampuan para pejabat publik (*official officers*) di dalam menterjemahkan dan menerapkan kebijakan publik, sehingga visi dan harapan yang dicapai dapat diwujudkan dalam realitas.

Pandangan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencapai apa yang mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan keputusan yang diinginkan. Senada dengan itu, Tangkilisan (2002) ada

tiga kegiatan utama yang paling penting dalam implementasi kebijakan, yaitu :

1) Penafsiran, 2) organisasi, 3) penerapan.”

Sedangkan Abidin (2004) mengemukakan bahwa implementasi suatu kebijakan berkaitan dengan dua faktor utama, yaitu :

1. Faktor internal yang meliputi :
 - (a) Kebijakan yang akan dilaksanakan, dan
 - (b) Faktor-faktor pendukung;
2. Faktor eksternal yang meliputi (a) Kondisi Lingkungan, dan (b) pihak-pihak terkait.

Sehubungan dengan implementasi kebijakan, banyak para pakar yang mengemukakan pendapat mengenai kebijakan publik, menurut Thomas R. Dye (2002), kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah baik untuk dilakukan maupun tidak dilakukan. Menurut David Easton (2001), kebijakan publik adalah alokasi nilai yang otoritatif untuk seluruh masyarakat, tetapi hanya pemerintahlah yang dapat berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan adalah hasil dari alokasi nilai-nilai tersebut. Menurut Harold Lasswell (2005) kebijakan dapat dirumuskan sebagai suatu program yang diproyeksikan dari tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktika-praktika. Sedangkan menurut Chandler dan Plano (2004) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk mencegah masalah publik atau pemerintah.

Definisi kebijakan publik diatas dapat dikatakan bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintahan yang berupa tindakan tindakan pemerintah, kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik dan kebijakan publik adalah tindakan pemelihan alternatif untuk dilaksanakan atautidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik.

B. Konsep Kemitraan

Kemitraan dilihat dari perspektif etimologi diadaptasi dari kata *Partnership*, dan berasal dari kata *Partner* dapat diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu, atau kampanyon”. Makna *Partnership* yang diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang baik.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata mitra adalah teman, kawan kerja, rekan. Sementara kemitraan artinya perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra. Hafsah (2000) Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.

Lan Lion (2005) Kemitraan adalah suatu sikap menjalankan bisnis yang diberi ciri dengan hubungan jangka panjang, suatu kerjasama bertingkat tinggi, saling percaya. Tenyson (2007) Kemitraan merupakan kesepakatan antar sector

dimana individu, kelompok atau organisasi sepakat bekerjasama untuk memenuhi sebuah kewajiban atau melaksanakan kegiatan tertentu, bersama-sama menanggung resiko maupun keuntungan dan secara berkala meninjau kembali hubungan kerjasama.

Secara teoritis, Eisler dan Montuori (2007) membuat pernyataan yang menarik yang berbunyi bahwa “memulai dengan mengakui dan memahami kemitraan pada diri sendiri dan orang lain, dan menemukan alternatif yang kreatif bagi pemikiran dan perilaku dominator merupakan langkah pertama ke arah membangun sebuah organisasi kemitraan.” Dewasa ini, gaya-gaya seperti perintah dan kontrol kurang dipercaya. Di dunia baru ini, yang dibicarakan orang adalah tentang karyawan yang “berdaya”, yang proaktif, karyawan yang berpengetahuan yang menambah nilai dengan menjadi agen perubahan.

Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo (2003), kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.

Dwiyanto (2011) Kemitraan berbeda dengan kerjasama yang bersifat non kemitraan. Kemitraan merupakan kerjasama yang dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, bersifat kolaboratif, adanya penggabungan sumberdaya, masing-masing pihak yang terlibat berada pada posisi yang setara sehingga nantinya manfaat dan resiko yang terjadi dalam berjalannya kemitraan akan ditanggung kedua belah pihak.

Kemitraan adalah suatu kesepakatan dimana seseorang, kelompok atau organisasi untuk bekerjasama mencapai tujuan, mengambil dan melaksanakan serta membagi tugas, menanggung bersama baik yang berupa resiko maupun keuntungan, meninjau ulang hubungan masing-masing secara teratur dan memperbaiki kembali kesepakatan bila diperlukan. (Ditjen P2L & PM, 2004)

1. Model-model Kemitraan

Secara umum, model kemitraan dalam sektor kesehatan dikelompokkan menjadidua (Notoadmodjo, 2003) yaitu:

a. Model I

Model kemitraan yang paling sederhana adalah dalam bentuk jaring kerja (*networking*) atau *building linkages*. Kemitraan ini berbentuk jaringan kerja saja. Masing-masing mitra memiliki program tersendiri mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya hingga evaluasi. Jaringan tersebut terbentuk karena adanya persamaan pelayanan atau sasaran pelayanan atau karakteristik lainnya.

b. Model II

Kemitraan model II ini lebih baik dan solid dibandingkan model I. Hal ini karena setiap mitra memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap program bersama. Visi, misi, dan kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan kemitraan direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi bersama.

C. Organisasi Kemitraan

Organisasi kemitraan dalam hal ini membahas tentang organisasi Kemitraan Usaha Bersama. Kemitraan Usaha Bersama merupakan salah satu upaya mendukung kebijakan pembangunan pertanian untuk meningkatkan taraf

hidup petani. Upaya peningkatan kesejahteraan petani, terutama bagi petani berlahan sempit, harus dilakukan dengan dua pendekatan secara simultan, yaitu : pertama, memperluas perusahaan lahan usaha tani melalui pola usaha kelompok tani (kelompok usaha tani) yang dikelola oleh satu manajemen usaha. Kedua, memperluas (menciptakan) lapangan kerja di pedesaan, baik melalui pengembangan komoditas maupun kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya yang dapat memberikan tambahan pendapatan ataupun usaha ekonomi alternatif bagi petani.

Terminologi kerjasama (*Partnership*) atau kemitraan, lazim digunakan untuk menggambarkan sebuah jalinan kerja antara dua atau lebih individu/organisasi untuk memproduksi suatu barang (*goods*) atau memberikan suatu pelayanan jasa (*service delivery*) Kariem (2003).

Beberapa pertimbangan pengembangan kemitraan, Kariem (2003):

1. Efisiensi dan kualitas, dimana kemitraan merupakan sarana untuk meningkatkan efisiensi dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini dibangun melalui penyertaan modal ataupun bentuk kontrak (*contracting out*).
2. Efektifitas, dimana setiap organisasi dalam rangka mencapai tujuannya dituntut untuk semaksimal mungkin sesuai dengan yang telah ditetapkannya (efektif) dan dengan menggunakan sumber daya sekecil-kecilnya (efisien). Namun apabila terjadi dinamika internal misalnya, menonjolnya kepentingan pribadi (*vested interest*) dari para anggota organisasi dalam menjalankan tugasnya, keterbatasan kemampuan

pelaksana, dan konflik antar anggota, maka harus dilakukan monitoring dan pengendalian.

3. Memacu dinamika organisasi, dimana dengan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi mitra, kerjasama pemerintah maka akan membuka peluang usaha lebih banyak bagi masyarakat.
4. Membagi resiko dan keuntungan (*risk and benefit sharing*) dengan mitra kerjanya. Selain juga menciptakan keuntungan bagi kedua belah pihak.

a. Jenis Kemitraan

Menurut Beryl Levinger dan Jean Mulroy (2004), ada empat jenis atau tipe kemitraan yaitu:

1) *Potential Partnership*

Pada jenis kemitraan ini pelaku kemitraan saling peduli satu sama lain tetapi belum bekerja bersama secara lebih dekat.

2) *Nascent Partnership*

Kemitraan ini pelaku kemitraan adalah partner tetapi efisiensi kemitraan tidak maksimal

3) *Complementary Partnership*

Pada kemitraan ini, partner/mitra mendapat keuntungan dan penambahan pengaruh melalui perhatian yang besar pada ruang lingkup aktivitas yang tetap dan relatif terbatas seperti *program delivery* dan *resource mobilization*.

4) *Synergistic Partnership*

Kemitraan jenis ini memberikan mitra keuntungan dan pengaruh dengan masalah pengembangan sistemik melalui penambahan ruang lingkup aktivitas baru seperti advokasi dan penelitian.

b. Syarat-syarat Kemitraan

1. Perusahaan Mitra

- a) Perusahaan yang berkaitan dengan pertanian.
- b) Memiliki itikad baik dalam membantu usaha petani.
- c) Memiliki teknologi dan manajemen yang baik
- d) Menyusun rencana kemitraan.
- e) Berbadan hukum dan memiliki bonafiditas (terpercaya)

2. Kelompok Mitra

- a) Merupakan kelompok tani- nelayan.
- b) Diutamakan kelompok yang telah dibina.
- c) Penandatanganan Perjanjian Kemitraan.

c. Pola Kemitraan

Pola kemitraan secara umum dapat diartikan sebagai bentuk kerja sama yang saling menguntungkan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Pelaksanaan hak dan kewajiban yang disepakati oleh kedua pihak mitra dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab merupakan syarat pokok berhasilnya suatu kemitraan.

Sumardjo, dkk (2010) Pola kemitraan adalah hubungan antara petani, kelompok tani, usaha. Perusahaan inti menyediakan lahan, sarana produksi,

bimbingan teknis, manajemen, menampung dan mengolah, serta memasarkan hasil produksi.

D. Pola Organisasi Kemitraan

Pola Organisasi Kemitraan merupakan upaya yang melibatkan berbagai sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah maupun bukan pemerintah, untuk bekerjasama dalam mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip dan peran masing-masing, dengan demikian untuk membangun kemitraan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu persamaan perhatian, saling percaya dan saling menghormati, harus saling menyadari pentingnya kemitraan, harus ada kesepakatan misi, visi, tujuan dan nilai yang sama, harus berpijak padalantaran yang sama, kesediaan untuk berkorban.

Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut kamus besar bahasa Indonesia pola berarti bentuk, atau sistem. Organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan mengejar tujuan bersama (Stoner.2002). Kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu. (Notoatmodjo. 2003). Jadi pola organisasi kemitraan adalah bentuk kerjasama antara organisasi untuk mencapai tujuan bersama, baik menanggung resiko, keuntungan, maupun keberhasilan.

Adapun **unsur-unsur kemitraan** yaitu:

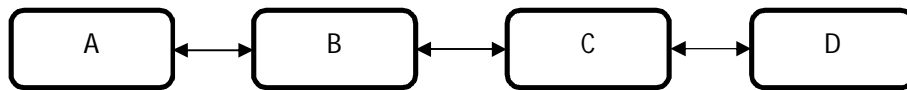
- a. Adanya hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih.

- b. Adanya kesetaraan antara pihak-pihak tersebut (equality).
- c. Adanya keterbukaan atau trust relationship antara pihak-pihak tersebut (transparancy).
- d. Adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan atau memberi manfaat (mutual benefit).

Selain itu, ada dua model pola organisasi kemitraan menurut More Hummer yaitu:

1. Model Rantai

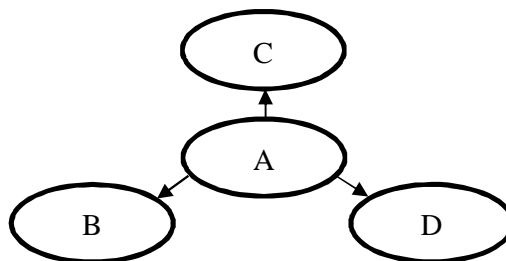
Pada pola organisasi kemitraan ini, hanya dikenal sebagai sistem arus keatas (upward) dan kebawah (downward). Artinya model tersebut menganut hubungan organisasi kemitraan garis langsung.



Gambar II.1: Pola Organisasi Kemitraan Model Rantai

2. Model Roda

Pada pola ini menjadikan semua laporan, instruksi, perintah kerja dan pengawasan terpusat pada satu organisasi yang menjadi pemegang kebijakan kemitraan.



Gambar II.2: Pola Organisasi Kemitraan Model Roda

E. Pengembangan Komoditas

Pengembangan komoditas hortikultura sebagai alternatif sumber perekonomian masyarakat dari sektor pertanian, senantiasa terus mendapat perhatian dari berbagai pihak. Secara umum masyarakat Kabupaten Pangkep 50% mata pencahariannya disektor pertanian, sehingga penting untuk dikembangkan. Dalam hal ini ada beberapa pengembangan komoditas dalam sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

1) Sektor Pertanian

Pertanian merupakan sektor primer yang mendominasi aktivitas perekonomian di Kabupaten Pangkep. Luasnya lahan pertanian dengan tanah yang subur membuat banyak masyarakat yang berprofesi sebagai seorang petani. Namun, taraf hidup petani di pangkep belum maksimal.

Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peran penting dalam pembangunan perekonomian indonesia. Tetapi pada sektor ini pula kurangnya perhatian dari pemerintah sehingga para petani masih banyak yang termasuk golongan miskin. Padahal sektor ini merupakan pembantu juga dalam hal tenaga kerja dan juga sebagian besar penduduk kita tergantung sektor ini untuk memenuhi kebutuhannya.

Sumber alam Pangkep memang sangat berlimpah ruah. Selain di wilayah kepulauan terdapat potensi perikanan dan parawisata, juga di wilayah daratan dan pegunungan terhampar potensi pertanian yang menjadi andalan utama masyarakat. Komoditas unggulan yang ada di kabupaten pangkep adalah Padi. Persawahan di Kabupaten Pangkep terbagi menjadi empat jenis yaitu sawah

dengan pengairan teknis, pengairan setengah teknis, irigasi sederhana dan tadah hujan. Dengan luas pengairan 150 hektar dapat memanen padi hingga 2 kali pertahunnya. Bentuk produksi dari padi ini dapat dibuat tepung beras dan beras sebagai makanan pokok. Berikut adalah beberapa komoditas unggulan yang ada di kabupaten pangkep dari data yang diambil :

Tabel II.1
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Pangan 2015-2017

No.	Jenis Tanaman	Satuan	2015	2016	2017
1.	Padi	Luas Panen (Ha)	22.783	21.807	20.740
		Produksi (Ton)	129.607	123.241	110.442
		Produktivitas (Kuinta/ha)	56,41	26,52	53,25
2.	Jagung	Luas Panen (Ha)	1.487	1.092	1.233
		Produksi (Ton)	8.042	5.700	4.980
		Produktivitas (Kuinta/ha)	53,50	52,20	40,39
3.	Kacang Kedelai	Luas Panen (Ha)	620	606	487
		Produksi (Ton)	1.228	1.098	804
		Produktivitas (Kuinta/ha)	18,93	18,10	16,51
4.	Kacang Tanah	Luas Panen (Ha)	1.009	1.015	1.084
		Produksi (Ton)	2.872	2.456	2.032
		Produktivitas (Kuinta/ha)	27,17	24,19	18,75
5.	Kacang Hijau	Luas Panen (Ha)	374	533	481
		Produksi (Ton)	4.735	609	546
		Produktivitas (Kuinta/ha)	12,30	11,40	11,35
6.	Ubi Kayu	Luas Panen (Ha)	206	157	108
		Produksi (Ton)	2.099	1.883	1.190
		Produktivitas (Kuinta/ha)	102,43	119,94	110,19
7.	Ubi Jalar	Luas Panen (Ha)	287	124	127
		Produksi (Ton)	3.107	1.326	1.370
		Produktivitas (Kuinta/ha)	108,27	106,93	107,87

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Pangkep 2018

Pembangunan Sub Sektor Perkebunan di Kabupaten Pangkep telah memperlihatkan peranan yang cukup berarti, hal ini ditandai dengan meningkatnya kontribusi terhadap Perekonomian Kabupaten pangkep.

Sehubungan dengan Strategi dan Kebijakan Pembangunan Perkebunan Kabupaten Pangkep, memiliki Sasaran Pembangunan Perkebunan adalah memulihkan Produksi dan Kualitas Kakao 24 Ton dan juga produksi kelapa

4.731 Ton pada tahun 2016, serta terbentuknya kawasan Agribisnis Perkebunan yang utuh disebut dengan Pusat Pengembangan Perkebunan di setiap lokasi Pengembangan dan Sentra-Sentra Produksi dengan azas kebersamaan ekonomi masyarakat/kerakyatan. Dengan demikian Petani Perkebunan sebagai anggota masyarakat melalui kelembagaan petani/assosiasi/koperasi, mempunyai peluang untuk memanfaatkan potensi ekonomi yang baik. Adapun komoditas unggulan kabupaten pangkep yaitu kakao dan kelapa :

Tabel II.2
Tanaman Perkebunan, Luas Lahan, Produksi, Produktivitas 2017

No.	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kuinta/ha)
1	Kelapa	4.290	64.650	853,65
2	Kopi	691	971	81,00
3	Lada	106	328	3,80
4	Kakao	252	782	31,64
5	Jeruk	769	7.960	11,22
Jumlah		6.108	74.691	981,31

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Pangkep 2018

3) Sektor Peternakan

Di Kabupaten Pangkep pembangunan ekonomi regional sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategi Pembangunan Propinsi dituntut untuk melakukan reorientasi pembangunan dengan mengutamakan kekuatan inti (*core business*) perekonomian yang mempunyai prospek dalam skala regional maupun nasional.

Laju Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang dibandingkan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2012 pertumbuhannya dari tahun 2013 sebesar 23,26%, tahun 2014 turun menjai

14,08%, tahun 2015 turun 6,44% dan pada tahun 2016 presentase pertumbuhannya naik 30,29% dari tahun 2017.

Bila dilihat jumlah populasi ternak besar terutama sapi dan kerbau mengalami peningkatan, kecuali ternak kuda yang mengalami penurunan sedikit. Tetapi bila dilihat pendapatan dari sektor peternakan mengalami penurunan pada 5 tahun terakhir maka terdapat perbedaan yang cenderung bertolak belakang. Adanya penurunan pendapatan dari sub-sektor peternakan tersebut, perlu diketahui diamati dan diteliti mengapa terjadi penurunan pendapatan dari sub-sektor peternakan.

4) Sektor Perikanan

Sektor perikanan dapat berperan dalam pemulihan dan pertumbuhan perekonomian di daerah pangkep karena potensi sumberdaya ikannya yang besar dalam jumlah maupun keragamannya. Kabupaten pangkep merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya laut yang beraneka ragam yaitu, dapat dilihat pada Tabel II.3:

Tabel II.3
Sumber Daya Laut Perikanan Kabupaten Pangkep

No.	Jenis Ikan	Produksi (Ton)
1	Peperek	61,8
2	Manyung	69,9
3	Gerot-Gerot	160,3
4	Ikan Merah/Bambangan	168,7
5	Pari	73,6
6	Layang	593,5
7	Selar	184,1
8	Tenggiri Papan	19,1
9	Belanak	52,8
10	Ekor Kuning	10,1
11	Tembang	825,5
13	Kakap	5,5
Jumlah		2.224,9

Jumlah alat tangkap ikan laut yang terbanyak adalah dengan menggunakan alat tangkap jaring klitik, yaitu 393 unit, jaring Insang tetap 286 unit, Dogol 183 unit, Pukat cincin 143 unit dan alat tangkap lainnya.

Dinas Pertanian adalah hadir sebagai fasilitator pembangunan yang berperan untuk memberdayakan dan mendukung petani secara maksimal dalam mendorong partisipasi aktif petani untuk pengembangan komoditas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para petani.

Untuk mencapai tujuan tersebut, frekuensi petani melaksanakan pola pendekatan “*bottom up planning*” dimulai dari identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi petani di lapangan sebagai bagian penting dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan pertanian.

Karena itu, kebijakan dan program yang dijalankan sehubungan dengan pengembangan komoditas didasarkan pada kondisi lapangan dan dilakukan melalui pendekatan kesisteman (*system approach*). Dari pendekatan kesisteman tersebut, secara berturut-turut merevisi regulasi yang menghambat, membangun infrastruktur, mekanisasi pertanian, perbaikan teknis produksi, pendampingan dan penguatan SDM, penanganan pasca panen, serta pengendalian harga panen. Hal tersebut merupakan parameter pengungkit yang mendapat prioritas dalam penyusunan program terobosan sesuai kebutuhan lapang.

Dalam upaya mendongkrak komoditas pangan, Dinas Pertanian senantiasa mendorong berbagai inovasi di sektor pertanian. Pengembangan inovasi yang dikembangkan tentu saja memiliki syarat penting, yaitu memenuhi unsur

pemenuhan kebutuhan petani sebagai pengguna inovasi dan pelaku utama pertanian secara spesifik lokasi.

Lebih jauh lagi bahwa Dinas Pertanian memiliki peran yang sangat besar dalam mengembangkan usaha pertanian di Kabupaten Pangkep. Dengan dukungan yang baik dari dinas pertanian, masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari bertani akan hidup semakin layak dan makmur. Perlu peran aktif dari setiap bagian di dalam dinas pertanian untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Ada beberapa peranan penting dari Dinas Pertanian dalam pengembangan komoditas di Kabupaten Pangkep adalah sebagai berikut :

1. Pemberian penyuluhan
2. Bantuan bibit, pupuk dan alat
3. Pengendalian harga
4. Penelitian.

F. Otonomi daerah dan Desentralisasi

Otonomi daerah atau desentralisasi adalah bahwa kewenangan untuk menjalankan fungsi atau mengurus daerah sendiri tidak datang begitu saja, tetapi merupakan keputusan politik yang ditempuh guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan.

Adapun yang menjadi tujuan dari pengembangan otonomi daerah adalah :

1. Memberdayakan masyarakat,
2. Menumbuhkan prakarsa
3. Meningkatkan peran serta masyarakat, dan
4. Mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkep Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang berbunyi bahwa (a) untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar sebagai warga negara, perlu diselenggarakan upaya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat secara terencana, terarah dan berkelanjutan oleh penyelenggara dan pemerintahan; (b) bahwa adanya kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, gejolak ekonomi global, kerawanan terhadap bencana alam dan risiko gagal usaha, serta adanya sistem pasar yang tidak transparan dan tidak berpihak kepada petani, maka diperlukan perlindungan dan pemberdayaan petani.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

G. Komoditas Petani Miskin Pangkep

Komoditas adalah sesuatu benda nyata yang relatif mudah diperdagangkan, dapat diserahkan secara fisik, dapat disimpan untuk suatu jangka waktu tertentu dan dapat dipertukarkan dengan produk lainnya dengan jenis yang sama, yang biasanya dapat dibeli atau dijual oleh investor melalui bursa berjangka.

Karakteristik dari komoditas yaitu harga adalah ditentukan oleh penawaran dan permintaan pasar bukannya ditentukan oleh penyalur ataupun penjual dan harga tersebut adalah berdasarkan perhitungan harga masing-masing pelaku komoditas. Contohnya dalam bidang pertanian seperti jagung, kedelai, karet, coklat, gula, kopi, beras, gandum dan lain-lain.

Akan tetapi komoditas ini tak banyak menguntungkan petani, menurut catatan Serikat Petani Pangkep (SPP) pendapatan petani rata-rata perharinya sekitar 5000 rupiah. Padahal dalam catatan Kementerian Pertanian, setiap tahun sekitar 25 juta rumah tangga petani memproduksi pangan seperti padi, jagung kedelai dan ubi dengan nilai sekitar 258 trilyun rupiah.

Tidak selamanya pembangunan di sektor pertanian itu menguntungkan bagi lingkungan dan juga petaninya sendiri, sekarang rantainya itu baru rantai pasar. Petani seringkali dihadapkan kepada masalah dengan menjual hasil panennya itu dengan harga sangat murah.

Pemerintah sebenarnya memiliki peranan yang cukup penting didalam pertanian. Dimana seharusnya pemerintah berperan aktif terutama dalam memajukan kesejahteraan petani. Walaupun tidak secara langsung setidaknya

pemerintah dapat membantu petani dengan cara sebagai fasilitator didalam membangun pertanian. Secara tidak langsung pemerintah seharusnya berperan sebagai “pengayom” yang mampu mendistribusikan manfaat sumber daya alam secara adil dan merata sesuai dengan salah satu tujuan leluhur kita mendirikan Negara Indonesia yang tergambar didalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Namun, kenyataannya dengan adanya beberapa kebijakan pemerintah malah mencekik petani. Misalnya saja, harga pupuk dan bibit yang melambung sedangkan harga jual hasil panen mereka cenderung lebih murah. Contohnya pada petani jeruk di pangkep yang hanya bisa menjual jeruk hasil panennya dengan harga 2000 rupiah.

Kebijakan pemerintah untuk melakukan impor berbagai komoditas pangan merupakan langkah yang salah. Karna hanya menguntungkan importir dan sangat merugikan para petani karena hasil tanamnya terganggu oleh keberadaan komoditas impor.

Kesejahteraan petani sangat berkaitan dengan daya beli masyarakat. Kemiskinan menyebabkan daya beli masyarakat lemah sehingga komoditas para petani hanya bisa dikuasai oleh importir. Padahal, jika komoditas hasil petani bisa langsung menguasai pasar masyarakat, ini akan jauh lebih baik dan tidak banyak mata rantai yang akhirnya membuat petani hanya mendapatkan untung sangat kecil.

H. Peningkatan Kesejahteraan Petani

Kesejahteraan petani merupakan tantangan pemerintah daerah di era otonomi. Otonomi daerah hendaknya mendekatkan pemerintah kepada petani,

menunjukkan kepedulian kepada petani dan pertanian, mempercepat pemecahan masalah petani dan pertanian. Dengan otonomi daerah Pemda memiliki posisi strategis dengan keleluasaan untuk menelorkan kebijakan dan program pembangunan pertanian yang semakin fokus, bisa menemukan komoditas unggulan sesuai potensi lokal, dan menemukan beragam upaya inovasi nilai tambah produk pertanian. Dengan otonomi, idealnya permasalahan yang dihadapi petani dan pertanian dengan cepat diketahui dan diberikan solusi yang memadai.

Unsur penting yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan petani adalah tingkat pendapatan petani. Walaupun demikian tidak selalu upaya peningkatan pendapatan petani secara otomatis diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petani, karena kesejahteraan petani juga tergantung pada nilai pengeluaran yang harus dibelanjakan keluarga petani serta faktor-faktor non-finansial seperti faktor sosial budaya. Walaupun demikian, sisi pendapatan petani merupakan sisi yang terkait secara langsung dengan tugas pokok dan fungsi. Oleh karena itu, dalam kerangka peningkatan kesejahteraan petani, prioritas utama Kementerian Pertanian adalah upaya meningkatkan pendapatan petani.

Sebagai salah satu kabupaten yang mempunyai potensi pertanian yang cukup besar, sektor pertanian hingga kini masih tetap memiliki peranan yang strategis dalam pembangunan kota. Agar sasaran pembangunan pertanian yang di maksudkan untuk tetap mampu mempunyai kontribusi yang nyata dalam perekonomian kabupaten pangkep dapat di capai, maka upaya-upaya khusus

perlu dikembangkan. Menurut menteri pertanian Amran Sulaiman (2015);

beberapa upaya yang perlu di tempuh antara lain :

1. Mengembangkan komoditas pertanian yang mempunyai keunggulan komparatif, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
2. Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian termasuk yang skala kecil yang biasanya dilaksanakan oleh petani, maupun skala besar yang biasanya di kembangkan oleh pengusaha.
3. Mengembangkan tersedianya bahan baku industri pengolahan hasil pertanian yang cukup kontinu; dan
4. Mengembangkan pelayanan pemberian kredit atau lembaga pelayanan yang lain agar proses produksi dapat berjalan lancar.

Dari keempat hal di atas, maka di harapkan bahwa sektor pertanian mampu berperan dalam:

1. Menyumbangkan hasil pertanian;
2. Menyumbangkan pangsa pasar dari hasil pertanian;
3. Menyumbangkan faktor produksi pertanian atau lainnya; dan
4. Menyumbangkan devisa yang semakin besar.

Dalam usaha pertanian, petani merangkap dua peranan yaitu sebagai berikut :

1. Petani sebagai penggarap yang memiliki peranan memelihara tanaman dan hewan agar mendapatkan hasil yang di perlukan.

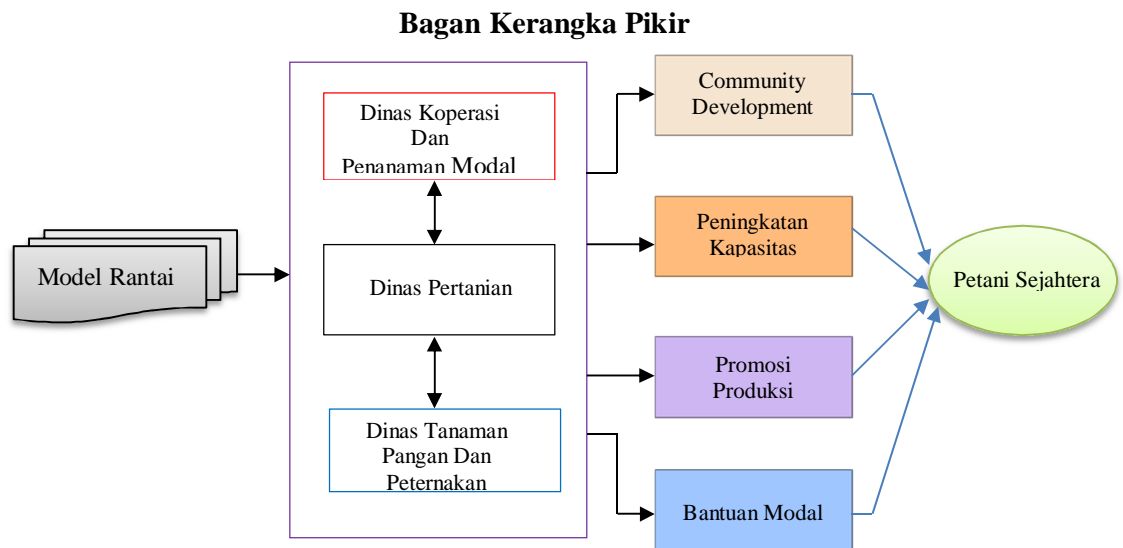
2. Petani sebagai manager yang memiliki peranan sebagai pengurus, pengelola serta bertindak sebagai sebuah pemimpin dalam kegiatan pertanian

Setiap manusia memiliki ciri khas tersendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan bekerja sebagai petani. Petani merupakan seseorang yang menggarap lahan yang mereka miliki untuk kegiatan bercocok tanam dan memperoleh hasil.

I. Kerangka Pikir

Pola organisasi kemitraan adalah bentuk kerjasama antara organisasi untuk mencapai tujuan bersama, baik menanggung resiko, keuntungan, maupun keberhasilan. Pengembangan komoditas hortikultura sebagai alternatif sumber perekonomian masyarakat dari sektor pertanian di Kabupaten Pangkep.

Berdasarkan hal tersebut, kerangka pikir yang akan menjadi acuan dalam penelitian ini adalah:



Gambar II.3: "Pola Organisasi Kemitraan Model Rantai" Hummer (dalam Ibrahim: 2008).

J. Fokus Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka focus penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah kemudian dirumuskan dalam rumusan dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Adapun deskripsi fokus penelitian ini terdiri dari beberapa hal pokok yang perlu diuraikan yaitu: terbentuknya pola organisasi kemitraan dalam pengembangan komunitas bagi petani miskin di Kabupaten Pangkep.

K. Deskripsi Fokus penelitian

1. Pola organisasi kemitraan adalah bentuk kerjasama antara organisasi untuk mencapai tujuan bersama, baik menanggung resiko, keuntungan, maupun keberhasilan.
2. Pengembangan komoditas hortikultura sebagai alternatif sumber perekonomian masyarakat dari sektor pertanian.
3. *Community Development* sebagai bentuk kegiatan masyarakat yang diarahkan untuk memperluas akses masyarakat dalam mencapai kondisi sosial ekonomi-budaya yang lebih baik dari sebelumnya.
4. Peningkatan kapasitas diarahkan untuk mempercepat penanggulangan Kemiskinan berdasarkan pengembangan kemandirian melalui peningkatan kapasitas masyarakat.
5. Promosi produksi adalah suatu bentuk usaha dari pemasar dalam menginformasikan dan mempengaruhi orang atau pihak lain sehingga tertarik untuk melakukan transaksi atau pertukaran produk barang atau jasa yang dipasarkannya.

6. Bantuan modal merupakan bantuan finansial dari suatu lembaga, organisasi atau lembaga lainnya dalam rangka pengembangan produksi petani guna mencapai kesejahteraan petani.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu dalam penelitian ini akan direncanakan dua bulan, yang dimana objek penelitian dilaksanakan di Dinas Pertanian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Adapun alasan peneliti memilih objek tersebut adalah karena banyaknya petani miskin yang nilai jual komoditasnya tidak sesuai dengan usahanya. Sehingga dibutuhkan peran serta organisasi kemitraan dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengembangan komoditas petani miskin.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena berdasarkan tujuan awal peneliti, ternyata masalah yang sedang dihadapi lebih sesuai untuk diteliti dengan metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (2011) Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pada penelitian ini peneliti menggunakan tipe Femenologi yang menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Femenologi dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji dan peneliti bebas untuk menganalisa data yang diperoleh.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer yaitu data empiris yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara. Jenis data yang ingin diperoleh adalah mengenai Pola Kemitraan dalam Pengembangan Komoditas bagi Petani Miskin di Kabupaten Pangkep serta data-data lain yang dibutuhkan untuk melengkapi penyusunan proposal.
2. Data Sekunder yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan peneliti. Adapun laporan atau dokumen yang bersifat informasi tertulis yang dikumpulkan peneliti adalah fungsi Kemitraan dalam pengembangan komoditas bagi Petani Miskin di Kabupaten Pangkep.

D. Informan Penelitian

Narasumber atau informan adalah orang yang bisa memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar (lokasi atau tempat) penelitian. Adapun teknik yang digunakan untuk menentukan informan dalam penelitian kualitatif ini dijelaskan oleh Sugiyono (2011) yaitu dengan jalan peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi, dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang mengetahui tentang situasi sosial tersebut. Adapun kegunaan informan menurut Lincoln dan Guba serta Bogdan dan Biklen (2006) yaitu sebagai berikut :

1. Membantu agar secepatnya dan tetap seteliti mungkin dapat membenamkan diri dalam konteks setempat, terutama pada peneliti yang belum mengalami latihan etnografi.
2. Agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjaring, jadi sebagai sampling internal, karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan sari subjek lainnya.

Pada penelitian ini, penentuan informan yang menjadi sumber data dilakukan dengan teknik purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu yang memahami fokus penelitian. Pada penelitian ini, penentuan informan dibagi menjadi dua yaitu sebagai informan utama dan informan penunjang. Informan utama yang lebih mengetahui fokus penelitian, sedangkan informan penunjang memberikan tambahan informasi. Pada penelitian ini informan utama yang dipilih oleh peneliti yaitu Kepala SKPD, sedangkan informan penunjang dalam penelitian ini yaitu pegawai skpd yang terkait, petani dan lembaga swadaya masyarakat yang fokus di bidang pengembangan komoditas petani.

Adapun daftar informan tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan objek penelitian yang lebih mengetahui kondisi di lapangan dalam fokus yang akan dikaji oleh peneliti. Oleh karena itu, data dan informasi yang peneliti peroleh dari proses observasi, wawancara maupun dokumentasi dapat dipastikan kebenarannya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Tabel III.1
Daftar Informan

Nama	Inisial	Jenjang Pendidikan	Usia	Jabatan / Pekerjaan
Drs. H. Ahmad Pramuda	AP	S2	53	Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Pangkep
Dewa Bochari	DB	S2	55	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM
Dr. Hj. Sriwati, M.Hum	SW	S3	49	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
Kamiruddin, M.Hum	KM	S2	49	Kepala Bidang Hortikultural Dinas Pertanian Pangkep
Syamsuddin	SY	S1	56	Ketua Komoditas Tani Mattirodeceng
H. Muharram	MH	SMA	62	Ketua Komoditas Tani Attangngale
Nurdin	NR	SD	42	Petani
Sulaiman Abbas	SA	SMP	76	Petani
Sitti Ramliah	SR	SMA	52	Petani

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Teknik Observasi

Teknik ini dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan yang merupakan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini yang dilakukan adalah pengamatan langsung terhadap Pola Organisasi Kemitraaan.

2. Teknik Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara melakukan wawancara kepada beberapa informan yang diambil sebagai sampel.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi juga dapat membantu untuk mengumpulkan data dalam penelitian, dokumentasi disini berfungsi untuk menangkap suasana di lapangan yang sebenarnya. Detail tentang peristiwa-peristiwa penting atau khususnya yang terjadi di lapangan. Dokumentasi disini berupa foto, rekaman tape atau alat perekam video. Sehingga setelah data terdokumentasi peneliti dapat sangat terbantu dengan adanya rekaman yang dihasilkan oleh alat dokumentasi.

F. Teknik Analisis Data

Adapun pada penelitian ini teknik analisa data yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam aktu tertentu. Selama di lapangan peneliti dalam menganalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang menggunakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif yang berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Proses tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini berlangsung secara terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Oleh

karena itu, jika peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang terlihat aneh, asing, tidak dikenal dan belum memiliki pola, justru inilah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

2. Penyajian Data

Penyajian data disini merupakan sekumpulan informasi asli tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adanya penyajian data yang baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif. Melalui penyajian-penyajian ini, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang kita dapat dari penyajian-penyajian tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sementara itu, dalam penjelasan Sugiyono (2011:2015) kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat kita kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, kesimpulan yang kita kemukakan adalah kesimpulan yang akurat dan terpercaya.

G. Pengabsahan Data

Pengabsahan data bentuk batasan kaitan suatu kepastian, bahwa yang berukuran benar-benar merupakan variabel yang ingin diukur. Keabsahan ini juga

dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang cepat. Salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi, yaitu taktik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, Sugiyono (2014).

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dilakukan umum dengan yang dikatakan dengan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi atau kuesioner. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pangkep

1. Sejarah Pemerintahan Kabupaten Pangkep

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Pangkajene dan Kepulauan belum bersatu dalam satu wilayah pemerintahan. Pangkajene dengan daratannya berstatus *Cnderafdeeling* dengan nama '*Onderafdeeling Pangkajene*' dibawah taktis '*Afdeeling Makassar*' dengan 7 adat gemenschap yaitu : Pangkajene, Bungoro, Labakkang, Ma'rang, Segeri, Mandalle dan Balocci. *Onder Afdeeling* Pangkajene waktu itu berada dibawah pengawasan seorang *Gezaghebber* setingkat *Controleur* yang berkedudukan di Pangkajene, sedang adat-adat *gemenschap* dipercayakan kepada karaeng – karaeng.

Wilayah kepulauan sebagai bagian dari *Stadsgemente* Makassar, dikepalai oleh Kepala Distrik Makassar yang wilayah meliputi : Pulau – pulau '*Spermonde*' , terdiri dari 57 pulau, Kalu-kalukuang Group terdiri dari 8 pulau, *Postelion* dan *Paternoster* terdiri dari 52 pulau. Pulau-pulau tersebut disusun berkelompok disesuaikan jangkauan geografisnya serta diperintah oleh seorang *Gallarang* , yang statusnya sama dengan 'Kepala Kampung'.

Di masa pemerintahan Jepang (1942 – 1945), Sistem pemerintahan di Pangkajene tidak berubah, yang berubah hanyalah bahasa. Adat *gemeenschap* dinamai "*Gun*", dikepalai '*Guntjo*', dikoordinir oleh '*Guntjo Sodai*' dari Indonesia dibawah taktis *Bunken Kanrikan* dari Jepang. Sedang pulau tetap

dalam wilayah '*Stadsgerente Makassar*' dengan penyebutan "*Makassar Si*", dikepalai '*Makassar Sitjo*' dan Distrik Makassar disebut "*Makassar Gun*", dikepalai "*Makassar Guntjo*".

Dengan *Staatsblad* 1946/17 Daerah-daerah bekas *Rechtstreeks Bestuursgebied* termasuk *Onderafdeeling* Pangkajene dibentuklah *swapraja* baru (*Neo Zelfsbestuur*), terdiri dari gabungan adat *gemenschap*. Wilayah kepulauan, mulai dipisah dari *Gemente Makassar* dengan Ketua Dewan Hadat Abdul Rahim Dg Tuppu, mantan Kepala District Makassar dengan anggota hadat : *Gallarang Balang Lompo, Gallarang Barrang lompo, Gallarang Sapuka, Gallarang Salemo, Gallarang Kalu-kalukuang, dan Gallarang Kodingareng*.

UU No. 22 Tahun 1948 yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat RI tetap bertahan meski Belanda belum mengakui kedaulatan Indonesia. Dengan SK Mendagri No. Des. 1/14/4/1951, Gubernur diperintahkan mempersiapkan daerah otonom baru setingkat Daerah Swatantra Tingkat II, disusul PP No.34/1952, jo. PP No.2/1952, dibentuklah DAERAH MAKASSAR yang berkedudukan di Sungguminasa, Takalar, Jeneponto, Maros, Pangkajene dan Kepulauan sebagai Daerah Otonom Tingkat II.

Akibat perkembangan kehidupan bernegara, lahir pula UU Darurat No. 2 Tahun 1957, dimana DAERAH MAKASSAR dipecah menjadi Daerah : Gowa, Makassar, Jeneponto dan Takalar. Kabupaten Makassar membawahi wilayah-wilayah : (1) *Onderafdeeling* Pulau-Pulau ; (2) *Onderafdeeling* Maros ; (3) *Onderafdeeling* Pangkajene dengan pimpinan Bupati Kepala Daerah Andi Tjatjo. Usaha simplikasi pembentukan daerah-daerah dilanjutkan Pemerintah

Pusat RI dengan UU No. 29 Tahun 1959, dimana Pangkep menjadi daerah otonom tingkat II, digabung dengan bekas onderafdeling pulau – pulau, sehingga menjadi Kabupaten Dati II Pangkep yang membawahi 9 kecamatan, yakni : Pangkajene, Bungoro, Labakkang, Ma'rang, Balocci, Segeri Mandalle, Liukang Tupabbiring, Liukang Kalmas, Liukang Tangaya dengan Bupati pertama, Mallarangeng Dg Matutu.

Kini, Kabupaten Pangkep tidak lagi terdiri dari 9 kecamatan, tapi 12 wilayah kecamatan. Sebagai bagian dari semangat Otonomi Daerah, maka lewat Perda No. 13/2000 (Lembaran Daerah No. 18 Tahun 2000) telah dibentuk tiga kecamatan baru. Wilayah administrasi pemerintahan Pangkep saat ini meliputi Pangkajene, Balocci, Bungoro, Labakkang, Ma'rang, Segeri, Liukang Tupabiring, Liukang Kalmas, Liukang Tangaya, Minasate'ne, Mandalle, dan Kecamatan Tondong Tallasa.

Sebagaimana catatan otentik yang ada menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 merupakan dasar hukum pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi. Salah satu daerah tingkat II tersebut adalah Kabupaten dati II Pangkajene dan Kepulauan yang sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 termasuk dalam bagian daerah Makassar yang disebut Onderafdeling Pangkajene sebagaimana dimaksud dalam bijblad Nomor 14377 Jls surat Ketetapan Menteri Dalam Negeri Indonesia Timur tanggal, 19 Januari 1950 Nomor UPU 1/1/45 JO Tanggal, 20 Maret 1950 Nomor UPU 1/6/23.

Salah satu kebanggaan bagi setiap daerah apabila mengetahui sejarah dan kelahirannya yang memberikan sesuatu makna dan nilai historis dan yuridis yang harus senantiasa tetap dijaga dan dipertahankan eksistensinya sebagai sumber motivasi moral bagi masyarakatnya.

Bertitiktolak dari motivasi tersebut dan berdasarkan atas kelahiran Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, maka pemuda-pemuda kitayang terhimpun dalam wadah organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Pangkep terdorong untuk mencoba mencari dan menghimpun masukan-masukan pendapat dari budayawan dan teknokrat dalam suatu Seminar Kelahiran Pangkep yang berlangsung dari tanggal 26 sampai 27 Maret 1986 dengan menampilkan para nara sumber antara lain :

- a. Prof. Dr. A.Zainal Abidin Farid, SH.
- b. Prof. Dr.Syahrudin Kaseng
- c. Drs.A.Samad Thahir
- d. Aminullah Lewa BA dan
- e. AM.Dg. Masiga

Seminar tersebut melahirkan alternatif tentang hari Jadi Pangkep yakni, didasarkan atas tinjauan kesejarahan satu kerajaan tua yang pernah ada di Pangkep yaitu di kecamatan Bungoro yang dikenal dengan kerajaan “Siang” pada masa antara abad 16 sampai abad ke 17.

Alternatif lainnya adalah didasarkan pada pertimbangan yuridis formal yakni dasar hukum pembentukan daerah tingkat II Pangkajene dan Kepulauan.

Bertolak dari hasil seminar tersebut, pihak pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Kepala Daerah membentuk tim perumus yang bertugas menghimpun dan merumuskan data-data yang otentik dan akurat yang dapat dijadikan dasar dalam penetapan hari jadi Kabupaten Pangkep, namun tim perumus dalam menetapkan Hari Jadi Pangkep atas dasar pertimbangan kesejarahan menemui kendala, oleh karena data data dan informasi tidak cukup dapat mendukung, sehingga tim perumus mencoba memanfaatkan data dan informasi dari sudut pertimbangan yuridis formal yang memberikan dua alternatif yakni, tanggal ditetapkannya surat keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah UP. 7/2/40-337 tanggal, 28 Januari 1960 tentang pengangkatan Mallarangeng Dg. Matutu sebagai Bupati Kepala Daerah tingkat II Pangkajene dan Kepulauan yakni pada tanggal, 28 Januari 1960 dan pilihan kedua adalah dari serah terima jabatan Mallarangeng dg. Matutu sebagai Bupati Kepala Daerah tingkat II Pangkajene dan Kepulauan.

Dua pilihan inilah yang diajukan oleh tim kepada bapak Bupati kepala daerah untuk menetapkan satu diantaranya untuk dijadikan dasar dalam rancangan Peraturan Daerah yang akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bahan pembahasan.

Berdasarkan dua pilihan yang diajukan tim tersebut, oleh Bupati Kepala Daerah dalam hal ini Bpk. M.R. Natsir menetapkan serahterima jabatan dari Andi Tjatjo kepada Mallarangeng Dg. Matutu sebagai momentum kelahiran Pangkep untuk disampaikan pada DPRD namun masih ditemukan sedikit

permasalahan dengan tidak ditemukannya berita acara pelantikan Mallarangeng Dg. Matutu.

Berkat keterangan Bpk. Mallarengeng Dg. Matutu secara pribadi bahwa pelantikan tersebut seingat beliau dilaksanakan pada hari Senin sebelum tanggal, 10 Februari dan setelah melihat penanggalan tahun 1960, menunjukkan bahwa hari Senin jatuh pada tanggal 1 dan tanggal 8 Februari 1960.

Hal inilah yang menjadi pengajuan rancangan peraturan daerah (Perda) kepada DPRD Tingkat II Pangkep. Berdasarkan data-data diatas, maka pada tanggal, 10 Februari 1992 rancangan perda tentang Hari JadiKabupaten daerah Tingkat II Pangkajene dan Kepulauan dibahas secara bersama-sama oleh pihak eksekutif dan legislatif dalam rapat paripurna tingkat I di gedung DPRD tingkat II Pangkep.

Dalam pembahasan rancangan Perda pihak legislatif cukup berhati-hati dan jeli untuk menetapkan hari jadiKabupaten Pangkep, sehingga pembahasannya dilakukan dalam sidang-sidang komisi khusus/gabungan yang menggunakan waktu cukup lama.

Berkat upaya dan kesungguhan semua pihak utamanya pihak eksekutif dan legislatif, pemuka masyarakat dan generasi muda akhirnya berhasil ditemukan salah satu arsip yang sangat menentukan penetapan Hari jadi tersebut, berupa arsip pidato/sambutan bupati kepala daerah pertama yaitu Bpk. Mallarangeng Dg. Matutu pada peringatan proklamasi kemerdekaan RI yang ke 15 pada tanggal 17 Agustus 1960.

Dalam pidato tersebut terdapat kalimat yang berbunyi sebagai berikut :

“ ... Sebagaimana kita ketahui pada hari Senin tanggal 8 Februari 1960 pimpinan pemerintahan di daerah ini telah ditimbang terimakan oleh pimpinan lama kepada yang baru.”

Atas dasar data otentik itu, akhirnya dipilih dan disepakati bersama pihak eksekutif dan legislatif untuk menetapkan hari jadi kabupaten daerah tingkat II Pangkajene dan Kepulauan jatuh pada tanggal 8 Februari 1960 yakni saat pelantikan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pangkep yang pertama yaitu Bpk. Mallarangeng Dg. Matutu secara defacto sebagai pejabat kepala daerah.

Untuk itu, maka pada tanggal 9 Juli 1992 dalam sidang paripurna DPRD ditetapkan rancangan peraturan daerah tentang Perda Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkep yakni peraturan daerah nomor 4 tahun 1962 yang menetapkan tanggal, 8 Februari sebagai Hari jadi kabupaten Pangkep.

Sebagai proses lanjut atas penetapan Perda tersebut, agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat maka pada tanggal 24 Juli 1962 diajukan pengusulan pengesahannya kepada Gubernur kepala Daerah Tingkat I Sulsel sebagai pejabat yang mengesahkan.

Setelah melalui pemeriksaan secara teliti dan mendalam pada Biro Hukum Setwilda tingkat I dan melakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya, akhirnya disetujui pengesahan Perda ini dengan surat keputusan Gubernur Tingkat I Sulsel No.100/8/92 tanggal 28 Agustus 1992 dan dicantumkan dalam lembaran daerahkabupaten daerah tingkat II Pangkajene dan Kepulauan nomor 7 tahun 1962 seri D Nomor 4.

Dengan lahirnya perda tentang hari jadi kabupaten daerah tingkat II Pangkep, maka hal ini menunjukkan tuntutan tanggungjawab kepada seluruh warga masyarakat kabupaten pangkep untuk menjaga dan melestarikan jatidiri daerahnya sebagai suatu yang tidak ternilai dan menjadikannya sebagai suatu kekuatan baru dalam memotivasi diri dalam mempertahankan kesinambungan didaerah ini.

Tabel IV.1

Nama-nama Bupati dan wakil bupati Pangkep dari masa ke masa

No.	Nama Bupati dan Wakil Bupati	Masa Pemerintahan
1	Andi Mallarangan	1960-1966
2	Brigjen (Purn) HM. Arsyad B	1966-1979
3	Kol. (Purn) H. Hasan Sammana	1979-1984
4	Kol. (Purn) Djumadi Junus	1984-1989
5	Kol. (Purn) H.M.R Natsir	1989-1994
6	Kol. CZI. Baso Amirullah	1994-1999
7	H.A Gaffar Patappe (Bupati) Drs. HM. Saman Sadek (Wakil Bupati)	1999-2004
8	H. Basrah Hafid SH, MM (Penjabat Bupati)	2004-2005
9	Ir. H. Syafrudin Nur M.si (Bupati) H.A Kemal Burhanuddin BSc (Wakil Bupati)	2005-2010
10	H.A Kemal Burhanuddin BSc (Bupati)	2010
11	H. Syamsuddin, A.Hamid, SE (Bupati) Drs. Abd. Rahman Assagaf (Wakil Bupati)	2010-2015
12	Dr. H. Ruslan Abu, SH. MH (Plt. Bupati)	2015-2016
13	H. Syamsuddin, A.Hamid, SE (Bupati) H. Syahban Sammana (Wakil Bupati)	2016-2021

Sumber : Pangkep.go.id

2. Letak dan Batas Geografis

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan biasa dikenal dengan pangkep, tiga dimensi, dan kota bolu. Hal tersebut tentunya disebabkan karena karakteristik wilayahnya yang merupakan perwakilan dari sebuah morfologi lahan, yaitu dataran tinggi (pegunungan), dataran rendah, dan kepulauan.

Karakteristik wilayah tersebut sehingga menjadikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tersebut sebagai miniatur Indonesia. Hal lain yang mendukung sebutan tersebut adalah masyarakatnya heterogen yang terdiri dari berbagai suku, diantaranya: bugis, makassar, mandar dan tator, jawa dan suku lainnya.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki luas wilayah 1.112,29 km^2 atau 111.229 Ha, sedangkan luas wilayah yang merupakan penetapan dari dua kementerian Lembaga Negara yaitu seluas 12.362,29 km^2 masing-masing: luas darat menurut Pemandagri No. 66 tahun 2017 yaitu 898, 29 km^2 dan luas laut 4 mil menurut Bakosurtanal (2017) dalam buku cakupan dan luas wilayah daerah otonom seluruh Indonesia yaitu 11.464 km^2 .

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terletak di bagian barat dari Provinsi Sulawesi Selatan, dengan ibu kota Pangkajene dan sebagai pusat pelayanan wilayah bagi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selain itu karena letaknya yang sangat strategis karena dekat dengan Ibu kota Sulawesi Selatan. Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan berada pada koodinat antara 110° sampai 119° Bujur Timur dan 4° 40' sampai 8° 00'' lintang selatan atau terletak di Pantai Barat Sulawesi Selatan dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Barru
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Bone dan Kabupaten Maros
- d. Sebelah barat berbatasan dengan pulau Kalimantan, pulau Jawa, dan Madura, pulau Nusa Tenggara dan Pulau Bali.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari 13 (tigabelas) kecamatan, dimana 9 kecamatan berada di daratan yang meliputi 2 kecamatan berada di wilayah dataran tinggi (pegunungan) yaitu Kecamatan Balocci dan Tondong Tallasa dan 7 kecamatan berada di wilayah dataran rendah yaitu kecamatan Pangkajene, Bungoro, Labakkang, Ma'rang, Segeri, Minasate'ne dan Mandalle. Sedangkan 4 kecamatan berada di wilayah kepulauan yaitu Kecamatan Liukang Tangaya, Liukang Kalmas, Liukung Tuppabiring, dan Liukang Tuppabiring Utara. Dengan demikian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dikenal sebagai daerah 3 dimensi yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar.

3. Kondisi Iklim

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kondisi tipe iklim ini menjadi tipe iklim C1 dengan bunga kering < 2 bulan, iklim tipe C2 dengan bunga kering 2-3 bulan, dan iklim dengan bulan kering 3 bulan keduanya memiliki bulan basah antara 5-6 bulan secara berturut-turut dalam satu tahun dengan curah hujan rata-rata 2.500-3.000 mm/tahun. Tipe ini merupakan tipe iklim agak basah.

Temperatur udara di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berada pada kisaran 21” sampai dengan 31 atau rata-rata 26,4° C. Keadaan angin berada pada kecepatan lemah sampai sedang.

4. Keadaan Penduduk

Kabupaten Pangkep yang terdiri dari tiga belas kecamatan menjadikan persebaran penduduk yang sangat beragam, dengan jumlah total penduduk mencapai 314.023 jiwa. Penduduk terbesar berada di Kecamatan Labakkang sebesar 46.983 jiwa kemudian Kecamatan Bungoro sebesar 42.282 jiwa, Kecamatan Pangkajene sebesar 39.866 jiwa dan Kecamatan Ma’rang sebesar 32.88 jiwa. Sementara kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Tondong Tallasa dengan jumlah penduduk sebesar 9.839 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel IV.1 berikut .

Tabel IV.2.

Jumlah Penduduk Pangkep Tahun 2017

No.	Kecamatan	Penduduk		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Liukang Tangaya	8.902	9.501	18.403
2	Liukang Kalmas	6.276	6.467	12.743
3	Liukang Tuppabiring	8.666	9.090	17.756
4	Liukang Tuppabiring Utara	6.628	7.227	13.855
5	Pangkajene	19.905	19.961	39.866
6	Minasate’ne	14.782	16.235	31.017
7	Balocci	7.793	7.934	15.727
8	Tondong Tallasa	4.731	5.108	9.839
9	Bungoro	19.415	22.867	42.282
10	Labakkang	21.958	25.025	46.983
11	Ma’rang	15.575	17.313	32.888
12	Segeri	9.446	10.483	19.929
13	Mandalle	6.049	6.868	12.735
Total		150.126	163.897	314.023

Sumber : Registrasi Penduduk Kabupaten Pangkep 2017

5. Potensi Sumber Daya Alam Sektor Pertanian Kabupaten Pangkep

a. Pertanian Tanaman Pangan

Sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan produktifitas dan kualitas tanaman pangan, Pembangunan pertanian khususnya tanaman pangan diarahkan untuk meningkatkan produksi padi, jagung, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar. Secara umum perekonomian daerah Kabupaten Pangkep didominasi sector pertanian, khususnya sektor pertanian tanaman pangan, selanjutnya sektor perkebunan, sektor perikanan, dan sektor peternakan. Untuk mendapatkan gambaran mengenai luas panen, produksi dan produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Pangkep dapat dilihat pada Tabel IV.3 berikut.

Tabel IV.3

Luas, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2017

No.	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kuinta/ha)
1	Padi	22.783	129.607	56,41
2	Jagung	1.487	8.042	53,50
3	Kacang Kedelai	620	1.228	18,93
4	Kacang Tanah	1.009	2.872	27,17
5	Kacang Hijau	374	4.735	12,30
6	Ubi Kayu	206	2.099	102,43
7	Ubi Jalar	287	3.107	108,27
Jumlah		26.766	151.690	379,01

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Pangkep 2018

Berdasarkan Tabel IV.3 menunjukkan bahwa penggunaan lahan untuk tanaman padi jauh lebih luas daripada tanaman pangan lainnya, hal ini terlihat dari luas panen untuk tanaman padi 22.783 Ha dibanding tanaman lainnya yang luas panennya jauh lebih kecil daripada luas panen padi.

b. Perkebunan

Usaha pokok yang ditempuh dalam pengembangan komoditas tanaman perkebunan. Usaha pengembangan tanaman perkebunan menempati prioritas bagi masyarakat komoditas petani setelah padi. Hal itu ditandai makin intensifnya usaha di bidang perkebunan ini terutama di pedesaan.

Walaupun jenis tanaman perkebunan Kabupaten Pangkep cukup banyak, namun yang mempunyai peranan dalam pengembangan komoditas dan dianggap cukup berpotensi dari segi produksinya hanya beberapa jenis saja yaitu: Kelapa, Kopi, Lada, Kakao dan Jeruk. Luas lahan, jumlah produksi, dan produksi dapat dilihat pada Tabel IV.4 berikut.

Tabel IV.4

Tanaman Perkebunan, Luas Lahan, Produksi, Produktivitas 2017

No.	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kuinta/ha)
1	Kelapa	4.290	64.650	853,65
2	Kopi	691	971	81,00
3	Lada	106	328	3,80
4	Kakao	252	782	31,64
5	Jeruk	769	7.960	11,22
Jumlah		6.108	74.691	981,31

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Pangkep 2018

Komoditas yang luas panennya paling tinggi adalah komoditas kelapa, akan tetapi hal ini tidak menjadikan minat petani dalam mengusahakan kelapa lebih tinggi. Disisi lain komoditi jeruklah yang paling tinggi minat petani dalam mengusahakan jeruk, karena harga komoditi jeruk sedikit lebih mahal dibanding dengan kelapa. Produktivitas untuk perkebunan di Kabupaten Pangkep masih

tergolong rendah , hal ini disebabkan karenan tehnik budidaya yang diusahakan petani tidak secara insentif.

c. Pertenakan

Sumber potensi yang utama bagi manusia berasal dari protein hewani termasuk ikan. Populasi ternak terbesar di Kabupaten Pangkep yaitu populasi ternak besar (Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing) dan ternak unggas (Ayam Kampung, Ayam Petelur, Ayam Pedaging, Itik). Jumlah populasinya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel IV.5
Jumlah Ternak Besar dan Ternak Unggas yang di Pelihara di
Kabupaten Pangkep

No.	Jenis Ternak	Jumlah (Ekor)
1	Sapi	25.985
2	Kerbau	11.568
3	Kuda	6.651
4	Kambing	32.362
5	Ayam Kampung	590.098
6	Ayam Petelur	23.469
7	Ayam Pedaging	68.693
8	Itik	242.159
Jumlah		1.000.985

Sumber : Pangkep Dalam Angka Tahun 2018

6. Visi, Misi Kabupaten Pangkep

a. Visi Kabupaten Pangkep

Pembangunan Pangkep tahun 2016 - 2021

“Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mewujudkan desa moderen yang produktif dan berkarakter menuju daerah yang lebih maju dan mandiri”

b. Misi Kabupaten Pangkep

Pembangunan Pangkep

Rumusan Misi disini lebih fokus pada, yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang tercermin dalam Visi. Karena itu dapat di pandang sebagai pondasi bagi pengambilan kebijakan strategis, juga menjadi ciri membedakan dengan daerah lain, sebagai berikut.

Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan dan memanfaatkan keunikan sebagai kepulauan untuk kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan kecerdasan, profesionalisme dan karakter SDM.

c. Arah Kebijakan dan Kebijakan Umum

Akselerasi pembangunan dapat dilakukan bila dapat di tetapkan strategi, arah dan kebijakan pembangunannya yang benar dan jelas, sehingga dapat menjadi acuan. Pembangunan yang akan dilakukan, secara substansial fokus pada pembangunan manusia, terdesentralisasi, berciri religius (bernafaskan keagamaan) dan kebudayaan, serta peduli lingkungan baik fisik maupun lingkungan sosial. Karena itu penekanannya pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, menempatkan manusia sebagai objek dan selalu berorientasi pada pada kesejahteraan.

B. Deskripsi Dinas Pertanian Kabupaten Pangkep

1. Tujuan dan Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Pangkep

a. Tujuan Dinas Pertanian Kabupaten Pangkep

- 1) Menwujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan buatan dengan memperhatikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- 2) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pengembangan wilayah dan peningkatan keterkaitan antara desa dengan kota untuk mendorong berkembangnya system agribisnis berbasis kerakyatan, secara bertahap, berkelanjutan, dan terdesentralisasi di kawasan Agropolitan.
- 3) Mengembangkan sumber-sumber produksi unggulan dan pangan local sesuai potensi lahan.
- 4) Mengembangkan Agroindustri dan Agrowisata.

b. Strategi Dinas Pertanian Kabupaten Pangkep

- 1) Penumbuhan dan pengembangan sentra komoditas unggulan wilayah andalan
- 2) Peningkatan intensifikasi pertanian melalui manajemen budidaya pertanian yang baik
- 3) Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP)
- 4) Berorientasi pada kekuatan pasar
- 5) Peningkatan nilai tambah melalui manajemen pasca panen yang lebih baik
- 6) Melakukan pemberdayaan masyarakat
- 7) Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana (infrastruktur) dasar dan penunjang serta modal kerja

- 8) Peningkatan pemanfaatan, penerapan dan penguasaan iptek
- 9) Peningkatan kerjasama atau kemitraan sinergi antar petani dan pelaku usaha
- 10) Peningkatan investasi
- 11) Pengembangan model-model pembangunan pertanian rakyat terpadu
- 12) Pemberian prioritas kepada distrik agropolitan yang perlu dikembangkan terlebih dahulu atau lebih cepat dibandingkan distrik lain.

c. Kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Pangkep

Sektor Pertanian menjadi salah satu sektor utama pembangunan yang berperan menghantarkan pencapaian Visi Pangkep 2018. Sebagaimana tercantum dalam pernyataan Misi kedua, Sistem Agropolitan diamanatkan untuk menjadi pendekatan utama dalam pembangunan pertanian Kabupaten Pangkep.

Selain itu, Ekonomi berbasis rakyat (Ekonomi kerakyatan) diposisikan sebagai fokus dan subjek utama pembangunan pertanian. Bertolak dari itu, diperlukan suatu rancangan Program Unggulan Pembangunan Pertanian yang mampu menjadi penggerak utama terwujudnya pertanian yang tangguh dan berdaya saing menuju pencapaian Visi Pangkep 2018.

Isu Strategi Pembangunan Pertanian meliputi Infrastruktur pertanian belum optimal, produktivitas SDM pertanian belum optimal dan Agribisnis dan Agroindustri belum padu, NTP belum optimal.

Konsep program unggulan Pembangunan Pertanian memiliki kriteria tersebut mengacu pada program unggulan yaitu:

- 1) Diarahkan untuk menjawab isu strategis pembangunan pertanian
- 2) Menggunakan pendekatan wawasan agropolitan
- 3) Berbasis pertanian rakyat
- 4) Memadukan sumberdaya intra-sektoral dan inter-sektoral
- 5) Dirancang untuk memberikan hasil nyata dan *outcome* dalam jangka menengah

Konsep Dinas Pertanian dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan untuk mencapai tujuan yang diharapkan mencakup banyak hal yaitu:

- 1) Peningkatan kinerja aparatur pertanian dan petani melalui pendayagunaan fasilitas serta kemampuannya
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana
- 3) Penumbuhan asosiasi/ forum komunikasi petani, meningkatkan swadaya masyarakat/ pengusaha sebagai mitra kerja petani
- 4) Meningkatkan peran dan fungsi UPTD lingkup Dinas Pertanian
- 5) Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan kawasan kemitraan dan kawasan pengembangan komoditas unggulan
- 6) Menggali potensi swadaya masyarakat dan investor
- 7) Pencegahan hama penyakit tanaman, ternak, dan penanggulangan bencana alam

- 8) Revitalisasi kelompok, pelatihan untuk petani, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana secara optimal
- 9) Kerjasama dengan masyarakat, instansi terkait dan investor untuk memantapkan agropolitan di Kabupaten Pangkep.

2. Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Pangkep

a. Tugas Dinas Pertanian Kabupaten Pangkep

Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian.

b. Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Pangkep

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Pertanian mempunyai fungsi yaitu:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan penyuluhan petani
- 2) Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas dinas
- 3) Penyelenggaran urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian
- 4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan penyuluhan
- 5) Pelaksanaan administrasi ketatausahaan Dinas
- 6) Penyelenggaraan pembinaan teknis dan administrasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas.

3. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Pangkep

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan No. 62 tahun 2016, tentang kedudukan, susunan organisasi pokok, fungsi dan tata kerja dinas pertanian.

Susunan organisasi badan terdiri dari:

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretaris
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evakuasi
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Asset
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
 - 1) Seksi Lahan dan Air
 - 2) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin
 - 3) Seksi Pembiayaan dan Investasi
- d) Bidang Tanaman Pangan
 - 1) Seksi Produksi
 - 2) Seksi Pembenihan dan Perlindungan
 - 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran
- e) Bidang Hortikultural
 - 1) Seksi Produksi
 - 2) Seksi Pembenihan dan Perlindungan
 - 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran
- f) Bidang Perkebunan

- 1) Seksi Produksi
 - 2) Seksi Pembenihan dan Perlindungan
 - 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran
- g) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 1) Seksi Pembibitan dan Produksi
 - 2) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - 3) Seksi Pengelolaan dan Pemasaran
- h) Bidang Penyuluhan
- 1) Seksi Kelembagaan
 - 2) Seksi Ketenagaan
 - 3) Seksi Metode dan Informasi
- i) Jabatan Fungsional
- j) UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas)

C. Hasil dan Pembahasan

Pola organisasi dalam pengembangan komoditas di Kabupaten Pangkep belum sepenuhnya berjalan secara maksimal. Hal itu dapat dibuktikan dengan belum maksimalnya pola kegiatan bagi organisasi yang bermitra dalam pengembangan komoditas petani miskin di Kabupaten Pangkep. Setiap organisasi cenderung melakukan kegiatan secara sektoral, tidak secara terkoordinasi yang saling terkait dan saling berpengaruh antara satu dengan lainnya dalam pengembangan komoditas di Kabupaten Pangkajene Kepulauan.

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana organisasi dalam kemitraan untuk pengembangan komoditas bagi petani miskin di Kabupaten Pangkep, ada beberapa aspek yang yang menjadi acuan, yaitu ;

1. Community Development

Community development merupakan bentuk kegiatan masyarakat yang diarahkan untuk memperluas akses masyarakat dalam mencapai kondisi sosial ekonomi-budaya yang lebih baik dari sebelumnya.

Kebijakan desentralisasi meskipun telah berjalan lama sejak 2001, akan tetapi dalam kenyataannya kebijakan tersebut belum mampu mengangkat derajat kemiskinan masyarakat di daerah khususnya petani miskin secara signifikan.

Sejalan dengan diterapkannya strategi pembangunan berkelanjutan, community development sebagai suatu pilihan konsep pembangunan utamanya dari ide partisipasi bersama dari beberapa/kelompok organisasi atau lembaga yang di sinergikan dengan upaya - upaya pemerintah untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Sasaran dari community development adalah untuk pembangunan kapasitas dan pengembangan masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam segenap aspek pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat.

Meskipun konsep tersebut sudah diacu, yang menjadi permasalahan saat ini adalah apakah konsep pembangunan melalui pengembangan masyarakat telah banyak dipraktekkan sebagai pilihan untuk mengatasi persoalan - persoalan publik yang muncul selama ini

Untuk mengetahui lebih jelas sejauh mana pengembangan kapasitas dilakukan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya petani miskin di Kabupaten Pangkep, berikut hasil wawancara Dinas Pertanian mengemukakan:

“Adanya berbagai program yang telah diterapkan perlu dikelola dengan baik sehingga hasil yang dapat saling mendukung. Pembangunan komunitas memang membutuhkan perhatian dari banyak pihak dan strategi yang tepat. Keberhasilan *community development* sebagai salah satu instrument untuk mewujudkan tujuan - tujuan pembangunan daerah dalam kerangka *good local governance*”. (Hasil wawancara KM 30, Mei 2018).

Sementara itu, ketertinggalan daerah dalam aspek pembangunan ternyata tidak hanya disebabkan oleh aspek/Lokasi saja, akan tetapi karena selama ini Pembangunan belum menyentuh kepada upaya-upaya memperkuat kapasitas kelompok masyarakat hingga pada level terkecil, sehingga pembangunan belum dapat menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, dalam arti menyentuh setiap elemen masyarakat dari berbagai problematika yang dihadapi.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Dinas Pertanian lebih jauh menjelaskan bahwa :

“Dengan adanya pergeseran paradig pembangunan daerah melalui proses desentralisasi, pemerintah daerah menjadi salah satu tumpuan harapan untuk Berperan aktif dalam mengembangkan potensi masyarakat, di antaranya melalui Pembangunan masyarakat”.

Pada sisi lain, praktek *community development* di berbagai daerah dalam Pelaksanaan juga banyak mengalami berbagai problematika. Problematika yang ditemui dalam praktek *Community development* dari berbagai kasus di daerah yang pertama adalah dari aspek kebijakan. Aturan kebijakan yang kurang jelas dan tidak komprehensif dirasakan menjadi hambatan dalam implementasi program *community development* di daerah. Kebijakan yang belum baku juga

dianggap menjadi penghalang dalam keberhasilan suatu program community development.

Salah satu bentuk kebijakan yang dianggap belum menyentuh pada masyarakat level bawah adalah kebijakan pemberian bantuan modal misalnya. Pada hal kebijakan seperti itu, sangat menolong dalam pengembangan komunitas petani untuk memperluas akses masyarakat dalam mencapai kondisi sosial dan peningkatan ekonomi lokal.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan peternakan”

“pemberdayaan yang kami lakukan itu memberi bantuan bibit dan merawat lahan guna menghasilkan hasil produksi yang baik dan meningkatkan perekonomian petani yang ada di Kabupaten Pangkep”(Wawancara SW, 23 Agustus 2018)

2. Peningkatan Kapasitas

Secara umum pengembangan kapasitas merupakan bagian yang penting di dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari pengembangan kapasitas misalnya dilaksanakan dengan pendidikan, baik secara formal maupun informal. Di dalam perusahaan misalnya melalui pelatihan-pelatihan sumberdaya manusia, pengembangan sistem manajerial. Di dalam pemerintahan pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan juga penting untuk meningkatkan performa aparatur dalam menjabarkan tugasnya sebagai abdi negara, dan juga regulasi dan deregulasi kebijakan pemerintahan.

Dalam konteks pembangunan secara keseluruhan pun upaya pengembangan kapasitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dengan kata lain tidak mungkin

terjadi suatu proses pembangunan/pengembangan dalam hal apapun tanpa upaya pengembangan kapasitas bagi pelaku maupun juga sistem yang mengaturnya.

Milen mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efektif, efisien dan terus – menerus . Sedangkan Morgan merumuskan pengertian kapasitas sebagai kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai -nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi -kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu. Lebih lanjut, Milen melihat capacity building sebagai tugas khusus, karena tugas khusus tersebut berhubungan dengan factor - faktor dalam suatu organisasi atau sistem tertentu pada suatu waktu tertentu.

UNDP (United Nations Development Program) dan CIDA (Canadian International Development Agency) dalam Milen memberikan pengertian Peningkatan kapasitas sebagai: proses di mana individu, kelompok, organisasi, institusi, dan masyarakat meningkatkan kemampuan mereka untuk (a) menghasilkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (core functions) memecahkan permasalahan, merumuskan dan mewujudkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dan (b) memahami dan memenuhi kebutuhan pembangunan dalam konteks yang lebih luas dalam cara yang berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan konsep pengembangan kapasitas menurut Grindle (2007) yang menyatakan bahwa pengembangan kapasitas sebagai *ability to perform appropriate task effectively, efficiently and sustainable*. Bahkan Grindle menyebutkan bahwa pengembangan kapasitas mengacu kepada *improvement in the ability of public sector organizations*

Keseluruhan definisi di atas, pada dasarnya mengandung kesamaan dalam tiga aspek sebagai berikut (Imam Hardjanto:2006)

- 1) bahwa pengembangan kapasitas merupakan suatu proses,
- 2) bahwa proses tersebut harus dilaksanakan pada tiga level/tingkatan, yaitu individu, kelompok dan institusi atau organisasi, dan
- 3) bahwa proses tersebut dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang bersangkutan.

Menurut Sofyandi, (2009:6) Peningkatan Kapasitas adalah suatu strategi dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen yaitu *Planning, Organizing, Leading* dan *Controlling*, dalam setiap aktifitas atau fungsi operasional sumber daya manusia mulai dari proses penarikan, seleksi, pelatihan dan pengembangan, penempatan yang meliputi promosi, demosi dan transfer, penilaian kinerja, pemberian kompensasi, hubungan industrial, hingga pemutusan hubungan kerja, yang ditujukan bagi peningkatan kontribusi produktif dari sumberdaya manusia organisasi terhadap pencapaian tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien.

Peningkatan Kapasitas petani sangat erat kaitannya dengan upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan. Pemberdayaan merupakan proses

memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strateginya. Membangun Peningkatan Kapasitas masyarakat petani tidak terlepas dari pembangunan dalam berbagai aspek strategis petani itu sendiri, yaitu aspek produksi, ekonomi, social dan ekologi.

Peningkatan kapasitas petani di Kabupaten Pangkep dipandang perlu untuk dioptimalkan. Hal tersebut dikarenakan pelatihan dan penyuluhan sebagai salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah tidak begitu optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pangkep mengatakan bahwa:

“Mengenai peningkatan kapasitas kami sudah melakukan kordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan untuk melakukan pelatihan dan penyuluhan kesetiap petani yang ada di desa-desa guna meningkatkan kapasitas pengetahuan bagi setiap petani yang ada di pangkep”.(Wawancara AP, 30 Mei 2018)

Sementara itu, hasil wawancara dengan Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Pangkep mengatakan bahwa:

“Dalam hal peningkatakan kapasitas, terus terang kami belum pernah melakukan pelatihan atau seminar dengan menghadirkan petani yang ada di pangkep, meski kami tetap berupaya melakukan untuk meningkatkan kapasitas para petani agar pengetahuan mereka berkembang dalam peningkatan produksi pertanian sebagai basis peningkatan ekonomi lokal” (Wawancar SW, 23 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka nampak dengan jelas bahwa selama ini tidak/belum terpolo organisasi secara bermitra dalam peningkatan kapasitas masyarakat petani dalam meningkatkan kesejahteraannya sebagai salag satu tujuan dari pembangunan nasional.

3. Promosi Produksi

Promosi produksi merupakan suatu bentuk usaha dari pemasar dalam menginformasikan hasil produksi dan mempengaruhi orang atau pihak lain sehingga tertarik untuk melakukan transaksi atau pertukaran produk barang atau jasa yang dipasarkannya.

Promosi adalah suatu aktivitas komunikasi dari produsen dalam hal ini produksi petani yang ditujukan kepada pemilik modal, pengusaha dengan tujuan supaya produk atau jasa, dapat dikenal sekaligus mempengaruhinya untuk mau membeli serta memiliki produk atau jasa tersebut.

Salah satu bentuk merosotnya harga jual hasil /produksi petani selain ditunjang oleh mutu yang kurang berkualitas, juga tak kalah pentingnya adalah kurangnya promosi yang dilakukan oleh instansi terkait yang memiliki kewenangan untuk mendorong usaha tani. Pada hal yang diharapkan disini adalah adanya aktivitas yang akan melahirkan kegiatan yang bersinergi dengan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pengembangan komoditas petani yang pada akhirnya tujuan program pengembangan komoditas sebagai penggerak ekonomi lokal dapat tercapai.

Kegiatan pertama dan utama yang perlu dilakukan oleh organisasi kemitraan sebagai penanggung jawab program pengembangan komoditas petani miskin di Kabupaten pangkep adalah mengidentifikasi potensi atau komoditas unggulan yang ada. Hasil identifikasi tersebut kemudian menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan untuk kemudian melakukan promosi produksi dengan

menfasilitasi masuknya pemilik modal atau investor dan memasarkan produk-produk komoditas yang ada di wilayah itu.

Sekaitan dengan promosi produksi di atas, Kepala Dinas Tanaman Pangan mengakui kalau hal tersebut belum dilakukan secara maksimal. Hal itu disebabkan tidak ditunjang oleh fasilitas yang memadai, seperti, leaflet, booklet, situs/wi-fi, terutama pengelola ajang promosi yang berpengalaman.

“kalau mengenai promosi produksi pertanian memang belum maksimal karena kami juga menunggu kerja sama dari dinas pertanian bagaimana ini untuk mempromosikan hasil pertanian dari petani yang ada di pangkep agar hasil pertaniannya terjual secara lancar dan diminati oleh masyarakat”(Wawancara SW, 23 Agustus 2018)

4. Bantuan Modal

Menurut Bambang Riyanto, (2013) Modal adalah hasil produksi yang digunakan kembali untuk memproduksi lebih lanjut. Dalam perkembangannya, kemudian modal ditekankan pada nilai, daya beli, ataupun kekuasaan menggunakan yang ada dalam barang-barang modal.

Modal merupakan salah satu factor penting yang harus dipenuhi dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan adanya akses permodalan yang baik, akan mempermudah para pelaku usaha tani dalam mengembangkan skala usaha. Skala usaha berbanding lurus terhadap akses permodalan sehingga dapat dikatakan jika akses permodalan baik akan meningkatkan skala usaha para petani. Sebagian besar petani menggunakan modal sendiri untuk membiayai usaha pertaniannya.

Kurangnya modal dalam usaha pertanian di Kabupaten Pangkep dapat dilihat dari hasil wawancara Kepala Dinas Tanaman pangan berikut ini :

“Mengenai bantuan modal sudah kami lakukan, meski belum merata ke semua petani karena keterbatasan anggaran yang kami miliki. Pihak kami akan terus berusaha untuk memfasilitasi ke setiap petani guna meningkatkan produksinya”(Wawancara SW, 23 Agustus 2018)

Di lain hal, Dinas Koperasi mengakui kalau para petani yang tergolong miskin ini ditawarkan untuk penjaminan modal dengan ketentuan memiliki jaminan berupa sertifikat tanah. Harapan itu agar petani tidak menganggap kalau penjaminan modal itu dianggap sebagai bantuan cuma-cuma. Penegasan ini berdasarkan hasil wawancara bahwa :

“Adapun bantuan modal kami sudah mengusahakannya guna meningkatkan hasil produksi petani, dengan jaminan sertifikat tanah. Dan setelah panen bantuan modal tersebut diharapkan dikembalikan tanpa membebani bunga pinjaman. Hanya saja masyarakat petani ini kelihatan masih ragu dengan kebijakan itu””(Wawancara DB, 23 Agustus 2018)

Hal ini pun diakui oleh salah seorang petani yang ditemui merasa kalau selama ini belum pernah menerima bantuan modal, mengungkapkan bahwa “

“Bantuan modal dimaksud kami belum pernah diberikan oleh pemerintah (dimaksud Dinas Koperasi) karena memiliki syarat yaitu sertifikat tanah. Kami ragu kalau nantinya penjaminan modal tersebut tidak dikembalikan dan lahan kami bisa disita”(wawancara ND, Juni 2018).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap studi tentang Pola Organisasi Kemitraan dalam Pengembangan Komoditas Petani Miskin di Kabupaten Pangkep, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. *Communtty Develotment* merupakan bentuk kegiatan masyarakat yang diarahkan untuk memperluas akses masyarakat dalam mencapai kondisi sosial ekonomi-budaya yang lebih baik dari sebelumnya. Akan tetapi dalam kenyataannya kebijakan tersebut belum mampu mengangkat derajat kemiskinan masyarakat di daerah khususnya petani miskin secara signifikan.

2. Peningkatan Kapasitas

Pengembangan kapasitas merupakan bagian yang penting di dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks pembangunan secara keseluruhan pun upaya pengembangan kapasitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Peningkatan kapasitas petani di Kabupaten Pangkep Nampak belum berjalan secara optimal. .

3 Promosi produksi

Promosi produksi merupakan suatu bentuk usaha dari organisasi mitra yang diberi amanah untuk menginformasikan hasil produksi petani. Meski demikian, hal itu belum kelihatan karena tidak ditunjang oleh fasilitas yang memadai (leaflet, booklet, situs, dsb).

4. Bantuan Modal

Ihwal bantuan modal yang akan diberikan kepada para petani, merupakan kebijakan yang sangat memberatkan bagi petani itu sendiri. Hal itu diperparah oleh adanya jaminan berupa sertifikat tanah.

B. SARAN

1. Diharapkan adanya bentuk kegiatan masyarakat yang diarahkan untuk memperluas akses masyarakat dalam mencapai kondisi sosial ekonomi-budaya yang lebih baik, dan dapat mengangkat derajat dari Kemiskinan petani .
2. Pengembangan kapasitas merupakan bagian yang penting di dalam berbagai aspek kehidupan, diharapkan dapat berjalan secara optimal, dan menyentuh seluruh aspek kehidupan bagi para petani.
3. Promosi produksi merupakan suatu bentuk usaha dari organisasi mitra yang diberi amanah agar lebih giat melakukan kegiatan promosi terutama kepada calon investor atau pemilik modal.
4. Bantuan modal yang akan diberikan kepada para petani, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani, hendaknya dilakukan tanpa syarat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anni Milen. 2004. *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas .Diterjemahkan secara bebas*. Pondok Pustaka Jogja, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Pertanian dan Pertambangan, Angka dalam subjek*.<https://pangkepkab.bps.go.id/> . Akses 15 November 2017. Pangkep
- Badan Pusat Statistik. 2011. *Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pangkep*,[https:// pangkepkab.bps.go.id/](https://pangkepkab.bps.go.id/) . Akses 15 November 2017. Pangkep
- Bogdan, Linclon. 2006. *Kegunaan Informan (Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&D)*. Alfabeta. Bandung.
- Djajah, Saefullah. 2006. *Studi Kebijakan Publik Tersebut Dapat Dipahami Dari Dua Perspektif, Perspektif Politik Dan Perspektif Admistrasi (Tachjan, Implementasi Kebijakan Pulik)*. AIPI, 2006. Bandung
- Dun. 2001. *Policy Implementation Is Essentially A Practical Activity, As Distinguished From Policy Formulation, Which Is Essentially Theoretical (Abdul Wahab, Pengantar Analisis Kebijakan Publik)*. UMM Press. Malang.
- Eva, Bonuwati. 2011. *Pengembangan Pola Kemitraan Pada Agribisnis Holtikultural*. Refika Aditama. Bandung.
- Grindle, M.S. 2007. *Getting Good Government : Capacity Building in the Public Sector of Developing Countries*, MA: Harvard Institute for International Development. Boston,
- Gun, Hogwood. 2014. *Implementasi Merupakan Sesuatu Yang Sangat Esensial Dari Suatu Teknik Atau Masalah Manajerial (Arifin Tahir, Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)*. Alfabeta. Bandung
- Ibrahim. 2006. *Hukum Organisasi Perusahaan, Pola Kemitraan dan Badan Hukum*. Refika Aditama. Bandung.
- Ibrahim, 2008. *Pola Organisasi Kemitraan dan Hukum Kemitraan Perusahaan*. Refika Aditama, Bandung.
- Imam, Hardjanto. 2006. *Pembangunan Kapasitas Lokal (Local Capacity Building)*. Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang hlm 8

- Ipb. 2013. *Kerangka Pikir*. <http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/53157/3/BAB%20III%20Kerangka%20Pemikiran.pdf>. Akses 9 November 2017. Ipb.ac.id. Makassar
- Jusuli, Affan. 2014. *Analisis Pola Kemitraan Petani Kapas dengan PT Nusafarm Terhadap Usaha Tani Kapas di Kabupaten Situbondo*. UNJEB. Jember
- Mazmanian, Sabatier. 2012. *Implementasi Kebijakan Dipahami Melalui Tiga Perspektif Yang Berbeda, Yaitu Pembuat Kebijakan, Pejabat Pelaksana Dilapangan Dan Aktor Individu Selaku Kelompok Target (Arifin Tahir, Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Alfabeta. Bandung
- Miles, Huberman. 2011. *Penarikan Kesimpulan (Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&D)*. Alfabeta. Bandung.
- Muhtar, Ayu. 2012. *Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Petani*. Agromedia. Jakarta Selatan
- Nakamura, Smallwood. 2012. *implementasi adalah (1) a Declation Government Preferences; (2) Mediated by a Number of Actors who; Relations and Negotiations (Arifin Tahir, Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)*. Alfabeta. Bandung
- Ningsi, Hartono, Selo, dkk. 2010. *Kemiskinan Struktural*. Sangkala Pulsar. Jakarta Pusat.
- Nugroho, Riant. 2014. *“Metode Penelitian Kebijakan”*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pangkep Nomor 4 tahun 2016 *tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*. Lembaga Negara RI Tahun 2016. Pangkep.
- Pramuji. 2013. *“Pemberdayaan Masyarakat Petani Miskin Marijinal di Kabupaten Bima”*. STISIP Bima. Bima.
- Riyanto, Bambang. 2013. *“Metode Penelitian Ekonomi Islam”*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Scribd. 2017. *Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli*, <https://www.scribd.com/doc/23817594/Thomas-R-Dye-Anderson-Jones-Dll>. Akses 18 September 2017. Scribd.com. Makassar

- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sunarti. 2015. *Peranan Dinas Pertanian (Diperta) Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan*. Kalimantan Utara. eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 3, Nomor 1, 2015: 190-200
- Sofyandi. 2009. "*Manajemen Sumber Daya Manusia*". PT. Prenhalindo. Jakarta
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI, 2006. Bandung
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Alfabeta. Bandung.
- Wahab, Abdul. 2012. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. UMM Press. Malang.
- Wahyuni, Wijayanti. 2017. "*Strategi Pemberdayaan Masyarakat Petani Melalui Pengembangan Agribisnis (Studi Kasus Gapokan Subur Desa Kedungjati, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Prubalingga)*". IAN Purwekerto. Jawa Timur.



Wawancara Informan HA, di depan kantor Dinas Pertanian Kabupaten Pangkep



Wawancara Informan SY, di Rumah Ketua Komoditas Mattirodeceng
Kabupaten Pangkep



Wawancara Informan NR, di Lokasi Ladang Pertanian dan Sawah Kabupaten Pangkep

RIWAYAT HIDUP



Haerun, lahir pada tanggal 23 Februari 1996, di Bungoro Pangkep Sulawesi Selatan. Penulis merupakan Anak Pertama dari 4 bersaudara, dari pasangan Abd. Latif dan Sugiarti. Penulis pertama kali masuk pendidikan formal di TK Pertiwi Pangkep pada tahun 2001 dan tamat pada tahun 2002. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SDN 3 Sambung Jawa dan tamat pada tahun 2008. Setelah menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Dasar penulis melanjutkan pendidikannya ke tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Bungoro dan tamat pada tahun 2011. Dimana pada saat Sekolah Menengah Pertama penulis tidak pernah mendapatkan peringkat juara kelas akan tetapi penulis aktif di berbagai organisasi sekolah seperti organisasi Pramuka, OSIS dan LDK (Latihan Dasar Kepemimpinan). Penulis melanjutkan pendidikannya ke tingkat selanjutnya yakni ke Sekolah Menengah Kejuruan, SMKN 1 Bungoro Masuk pada tahun 2011 dan tamat pada tahun 2014, penulis mengambil jurusan Akuntansi Keuangan dan melanjutkan beberapa organisasi OSIS dan Pramuka di Sekolah Menengah Kejuruan tersebut. Pada tahun yang sama penulis di berbagai perguruan tinggi Negeri akan tetapi penulis tidak lulus dan terdaftar di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Penulis mengikuti salah satu Organisasi Daerah yaitu IPPM Pangkep (Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Pangkep).